

**UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NO. 19 TAHUN 2002**

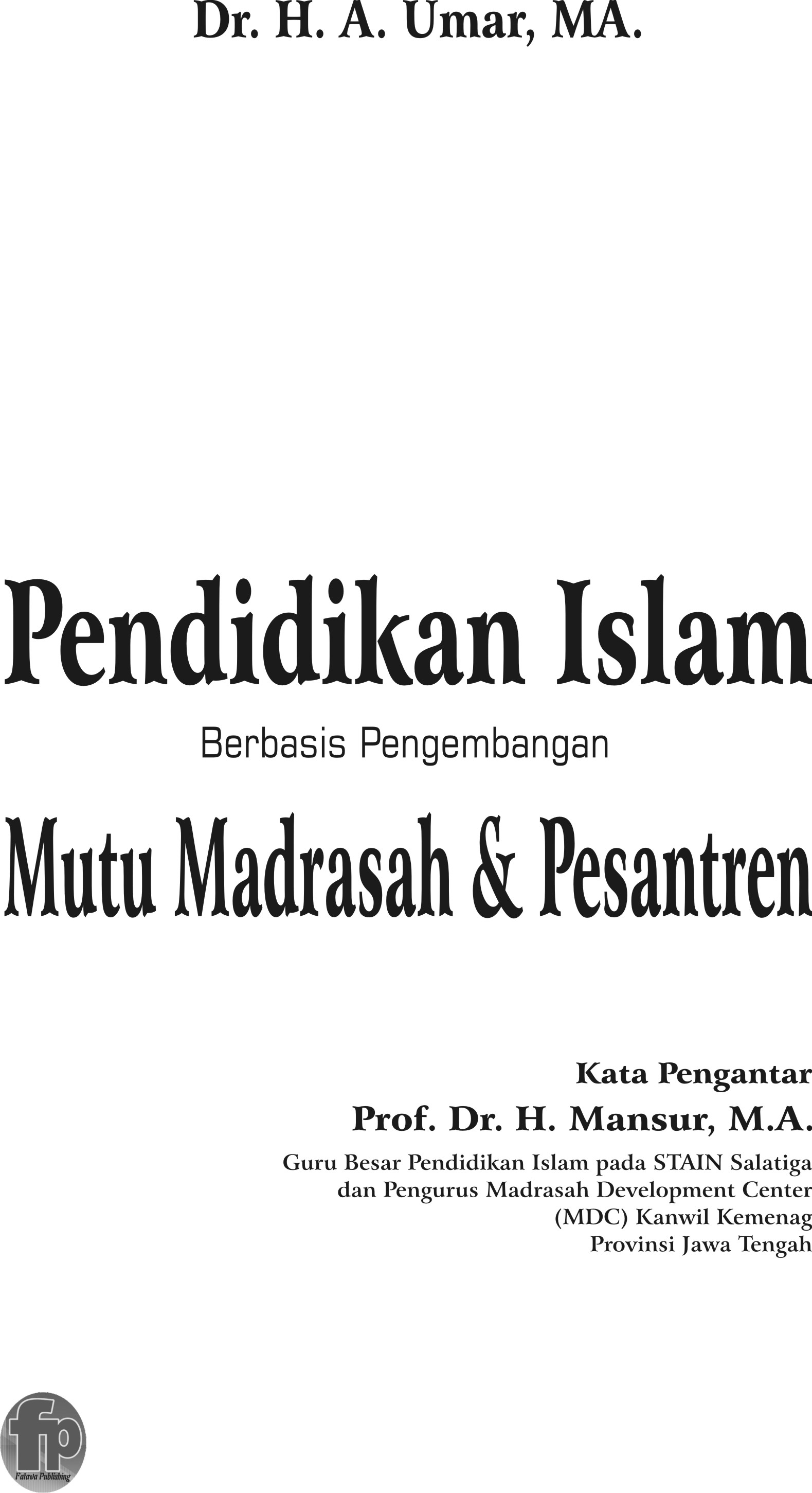
**Pasal 2**

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta dan PemegangHak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 72**

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana denganpidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, meng­edarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana di­maksud pada Pasal 2 ayat (1), di­pidana dengan pidana penjara pa­ling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyakRp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).



Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Dr. H. A. Umar, MA.

Pendidikan Islam Berbasis Pengembangan Mutu Madrasah & Pesantren/A. Umar,—Semarang: Fatawa Publishing, 2014.

ISBN 978-602-0887-03-6

Pendidikan Islam Berbasis Pengembangan   
Mutu Madrasah & Pesantren

Penulis:  
Dr. H. A. Umar, MA.

Desain Isi & Cover:  
Tim Fatawa Publishing

Penerbit:

FATAWA PUBLISHING

Jl. Beringin Raya KM. 02 RT/RW. I/VIII Ngaliyan, Semarang,   
Jawa Tengah, IndonesiaTelp. (024) 024-74019660, 0813-2668-3562

Website: www.fatawa-publishing.com

Email: fatawapublishing@gmail.com

ISBN: 978-602-0887-03-6

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No. 19 Th. 2002

*All rights reserved*

Cetakan Pertama, September 2014

KATA PENGANTAR

MENGEMBANGKAN FITRAH MANUSIA MENUJU INSAN KAMIL

Oleh: Prof. Dr. H. Mansur, M.A.  
Guru Besar Pendidikan Islam pada STAIN Salatiga dan Pengurus Madrasah Development Center (MDC) Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah

*Assalamu’alaikum Wr.Wb.*

Puji dan syukur ke hadirat Allah swt. yang telah melim­pah­­kan beberapa nikmat kepada kita, sehingga dapat me­lak­sanakan tugas hidup kita di dunia ini yakni ber­iba­dah kepada Allah antara lain dengan menjunjung tinggi pendidikan Islam baik melalui pendidikan madrasah maupun pe­san­tren. Untuk mendukung hal itu maka Dr. H. A. Umar, MA. pada kesem­patan ini menyuguhkan buku yang berjudul *Pendidikan Islam Berbasis Pengembangan Mutu Madrasah dan Pesantren*.

Dalam masyarakat yang dinamis, pendidikan di kalangan umat Islam, merupakan salah satu bentuk ma­ni­­festasi dari cita-cita hidup Islam untuk melestarikan, mengalihkan dan me­na­namkan (internalisasi) serta men­trans­formasikan nilai-nilai Islam tersebut kepada pribadi generasi penerusnya sehingga nilai-nilai *cultural-religius* yang dicita-citakan tetap berfungsi dan berkembang dalam masyarakat dari waktu ke waktu.

Pendidikan Islam, bila dilihat dari segi kehidupan cultural umat ma­nu­sia tidak lain adalah merupakan salah satu alat pem­budayaan (enkulturasi) masyarakat itu sendiri. Sebagai suatu alat, pendidikan dapat difungsikan untuk meng­arahkan pertumbuhan dan perkembangan hidup ma­nu­sia (sebagai makhluk pribadi dan sosial), kepada titik optimal kemam­puan­nya untuk memperoleh kesejahtera­an hidup di dunia dan akhirat.

Dr. H. A. Umar, MA. menyadari bahwa pendidikan me­ru­pakan proses ke­giatan yang mengarah pada ke­sem­pur­na­an insani, yang tujuannnya adalah *taqorrub* mendekatkan diri kepada Allah swt. dan kesempurnaan iman yang tujuannya men­capai kebahagiaan dunia dan akhirat dengan penonjolan ka­rak­teristik moralitas keagamaan.

Pendidikan Islam adalah upaya proses pembentukan akhlak pada diri manusia untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah swt. yang pada akhirnya berorien­tasi pada pen­capaian kebahagiaan dunia dan akhirat, fenomena ini sebagai wujud nyata penegasan dan acuan untuk menjalankan agama Islam secara utuh dan sem­pur­na serta sekaligus meru­pa­kan salah satu strategi dalam hal usaha untuk memelihara dan mengem­bang­kan fitrah manusia serta berbagai potensi yang ada padanya untuk menuju terbentuknya manusia se­utuh­nya (*insan kamil*) yang sesuai dengan norma-norma Islam.

Sebuah buku merupakan salah satu cermin dan citra ilmiah yang paling solid dalam kehidupan. Penulis buku ini Dr. H. A. Umar, MA. sebagai pejabat yakni kepala Kemenag kabupaten Pekalongan, yang sebelumnya sebagai kepala Kemenag kota Salatiga, di sela-sela ke­si­bukan seorang pejabat yang luar biasa masih bisa me­nyempatkan waktu untuk me­nu­lis sebuah buku yang ada di hadapan pembaca, yang dihasil­kan dari seminar ilmiah sampai khutbah. Sebab beliau menya­dari, melalui buku termasuk membaca buku ini, akan dapat me­­nam­bah pengalaman ilmiah seperti memperluas wawasan, memperluas cakrawala berpikir, menjadi kritis atau sekurang-kurangnya berpindah dari tidak mengetahui menjadi orang mengetahui. Dengan memanfaatkan buku sebagai sebuah in­for­masi, orang bahkan dapat meng­kaji dan me­ne­mu­kan di­namika tertentu dan kemudian terdorong untuk me­ran­cang sesuatu atau ber­tin­dak untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik dan berguna baik bagi dirinya, bangsa dan negara­nya.

Oleh karena itu dipandang sebagai suatu kewajiban moral bagi setiap insan yang mempunyai ilmu untuk senantiasa me­mun­culkan minat, motivasi, dan mening­kat­kan kemauan untuk selalu melekatkan diri pada buku, untuk menghadirkan buku yang dibutuhkan masyarakat agar lebih bermanfaat. Per­sem­bahan buku ini bukan hanya sebagai cermin sisi kreatif seorang ilmuan sekaligus sebagai pejabat, tetapi juga sebagai per­tanggung jawabankeberadaannya dalam ikut mencer­das­kan kehidupan bangsa dan mencegah timbulnya gerakan tero­ris­me di negeri tercinta ini.

Pencarian hakekat pendidikan Islam merupakan persoalan yang tidak pernah mengenal titik akhir. Lebih-lebih dalam era perkembangan pesat ilmu penge­tahuan dan teknologi masa kini, pendidikan Islam makin dirasakan tidak mampu berpacu dengan tuntutan perkembangan masyarakat Islam. Karena itu setiap upaya ke arah pencarian sistem pendidikan yang mam­pu merespon tuntutan masyarakat dan umat Islam perlu men­da­patkan dukungan.

Dalam dasawarsa terakhir ini, secara kuantitas maupun kualitas memang penerbitan buku menunjukkan perkem­bangan yang positif. Namun kita melihat bahwa buku-buku tentang pendidikan Islam berbasis pengembangan mutu mad­rasah dan pesantren, yang berisi tentang nilai pendidikan Islam dalam perspektif keagamaan, pendidikan Islam dalam pen­di­dikan nasional, menggagas madrasah maju, pendidikan pesan­tren berbasis karakter dan membangun etos kerja, yang ditulis seorang pejabat tidaklah terlalu banyak diterbitkan. Padahal informasi baru tentang bidang ini juga sangat dibutuh­kan kha­la­yak, terutama bagi mereka yang bergelut terhadap dunia pen­didikan Islam, baik dalam keluarga, masyarakat, mad­rasah maupun pesantren.

Untuk itulah kiranya penulis buku ini sebagai pejabat yang dulu pernah sebagai akademisi dosen di sebuah perguruan ting­gi merasa terpanggil untuk mengantisipasi dan mengisi ke­ko­songan atau kelowongan ini, dengan menghadirkan buku yang dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat yang meng­ge­lu­ti dunia pendidikan Islam baik formal, informal dan non formal.

Saya sebagai Guru Besar Pendidikan Islam pada STAIN Salatiga dan selaku pengurus Madrasah Development Center (MDC) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah menyambut senang hati atas terbitnya buku yang ditulis oleh Dr. H. A. Umar, MA ini. Mudah-mudahan ke­ha­diran buku ini akan memberi manfaat ganda. *Pertama*, akan diterima Allah swt. sebagai ilmu yang bermanfaat bagi penulis, yang akan tetap mendapatkan pahala walaupun sudah me­ning­gal dunia. *Kedua,* diharapkan akan dapat diterima sebagai sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan keislaman, men­jadi sebuah sumbangsih yang bermanfaat bagi masyarakat yang peduli terhadap pendidikan anak bangsa.

Bagi pembaca yang menemukan beberapa kesalahan dalam buku ini dapat menyampaikan kritik konstruktif kepada penulis buku ini atau dengan menerbitkan buku serupa untuk melengkapi dan menyempurnakannya. Semoga dengan segala ke­terbatasan dan kekurangannya yang masih ditemui dalam buku ini, tidak akan mengurangi maksud dan tujuan awal dari penulis, dan sekali lagi semoga bermanfaat dan mendapatkan ridha Allah swt. *Amin*.

*Wassalamu’alaikum Wr.Wb.*

Salatiga, 17 Agustus 2014

**Prof. Dr. H. Mansur, MA**

PENGANTAR PENULIS

**SEGALA** puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. pem­bawa rahmat bagi semesta alam.

*Alhamdulillah*, buku “Pendidikan Islam Berbasis Pe­ngem­bangan Mutu Madrasah & Pesantren” telah ter­sa­ji dihadapan para pembaca. Materi yang disajikan dalam buku ini berisi ten­tang eksisnya nilai-nilai pen­di­dik­an Islam serta peran stra­te­gis­nya dalam pengem­bang­an Mutu pen­di­dikan Islam dan mem­ben­tuk akhlak siswa. Penyusunan buku ini diharapkan bisa men­jadi jem­­­­­batan ilmu dan sebagai pedoman praktis dalam mem­­­bentuk madrasah dan pesantren sebagai wadah dalam mem­bina gerenasi-generasi Islam yang ber­wa­wasan *wasathiyah* (moderat).

Kehadiran buku yang sangat sederhana ini, berawal dari gagasan mengumpulkan ide yang berserakan di­an­tara tulisan artikel, makalah seminar, dan teks khutbah yang pernah pe­nu­lis lakukan selama menjadi kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Grobogan (2005-2008), Kepala Kantor Ke­men­terian Agama Kota Salatiga (2008-2010) dan kepala Kantor Kemen­te­rian Agama Kabupaten Pekalogan(2010-sekarang).

Ucapan terima kasih kepada semua pihak terutama ke­pa­da sahabat penulis, yang terhormat Prof. Dr. H. Mansur, M.A. Guru Besar Pendidikan Islam pada STAIN Salatiga dan Pengurus Madrasah Development Center (MDC) Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah yang berkenan memberikan ko­reksi dan kata pengantar buku ini. Terima kasih juga kepada pimpinan Redaksi Jawa Pos (Radar Kudus), Majalah Rindang Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah, Majalah Ma’arif NU Jawa Tengah yang telah memuat artikel penulis.

Tak ketinggalan ucapan terim kasih kepada Pemkab Kab. Grobogan, sahabat-sahabat PW IPNU Jawa Tengah, panitia PHBI kota Salatiga dan Ta’mir Masjid Al-Muhtarom Kajen Kabupaten Pekalongan yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menyampaikan makalah seminar, dis­kusi, dan khutbah (Jum’at, Idul Fitri & Idul Qurban). Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam buku ini.

Penulis sadar, buku ini jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik para pembaca sangat di­harapkan untuk per­baikan selanjutnya. Semoga buku ini ber­man­fa­at, khususnya untuk pengembangan madrasah, pe­san­tren dan dunia pen­di­dikan di Indonesia. *Semoga*.

Pekalongan, Mei 2014

Penulis,

**Dr. H. A. Umar, MA.**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar — v

PengantarPenulis — xiii

Daftar Isi — xv

Pendahuluan

MEMUPUK OPTIMISME KEMENTERIAN AGAMA — 1

Bagian Pertama  
NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM RITUAL KEAGAMAAN — 9

1. Haji sebagai Modal Akhirat — 11

2. Ramadhan dan Internalisasi Etika Shalat— 18

3. *Sadaqah* dan Puasa yang Berkualitas— 23

4. Idul Fitri dan Peningkatan Amal Shaleh — 29

5. Makna Qurban dalam Pendidikan — 35

Bagian Kedua

PENDIDIKAN ISLAM DALAM BINGKAI PENDIDIKAN NASIONAL — 41

1. Pendidikan Islam dalam Bingkai Pendidikan Nasional— 43
2. Perlindungan Anak & Keluarga Perspektif   
   Agama — 49
3. Kurikulum 2013 danProblematikanya Bagi   
   Guru— 54

Bagian Ketiga

MENGGAGAS MADRASAH MAJU — 61

1. Kiat Sukses Membina Madrasah— 63
2. Posisi Madrasah dalam Otonomi   
   Daerah— 68

Bagian Keempat

PENDIDIKAN PESANTREN BERBASIS KARAKTER — 75

1. Pesantren dan Perubahan Sosial — 77
2. Reorientasi Kurikulum Pesantren — 87
3. Pesantren dan Terorisme— 92

Bagian Kelima

MEMBANGUN ETOS KERJA— 99

1. Personality dalam Public Relation (Upaya Membangun Jaringan Kerja — 101
2. Pers dan Moralitas Bangsa — 105

Daftar Pustaka — 111

Tentang Penulis —113

Pendahuluan

MEMUPUK OPTIMISME   
KEMENTERIAN AGAMA

**EKSISTENSI** Kementerian Agama Republik Indonesia dalam tata pemerintahan di negeri ini me­mi­li­ki posisi yang sangat kuat, karena kementerian ini dibentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29, ayat 1 “Negara berdasarkan atas Ke­tu­hanan Yang Maha Esa”dan ayat 2 “Negara men­jamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama­nya masing-masing dan beribadat menurut agama­­nya dan kepercayaannya itu”. Di­sam­ping itu di­kuat­kan juga dengan Penetapan Pemerintah yang ter­tuang dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/SD Tahun 1946 tanggal 03 Januari 1946, tentang dibentuknya Kementerian Agama.

Sejak dibentuknya Kementerian Agama Republik Indonesia, maka tugas-tugas pemerintahan dalam bi­dang agama dilimpahkan kepada kementerian agama. Maka tugas-tugas keagamaan menjadi tugas dan tang­gung jawab Ke­men­terian Agama.

Tanggal 3 Januari atau lebih tepatnyapada hari Kamis tanggal 3 Januari 1946 Miladiyah yang ber­te­patan dengan tanggal 29 Muharram 1364 Hijriyah adalah hari bersejarah bagi Kementerian Agama, se­hing­ga tanggal 3 Januari ditetapkan se­ba­gai hari lahir Ke­men­terian Agama atau yang dikenal dengan Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama.

Tantangan Kementerian Agama

Sebagai salah satu kementerian yang besar, per­jalanan panjang Kementerian Agama telah menorehkan prestasi yang cukup baik dalam kancah internasional, antara lain pengakuan dunia internasional terhadap penyelenggaraan ibadah haji se­lama tiga tahun terakhir, disamping itu model kerukunan umat beragama di Indonesia dijadikan rujukan negara-negara lain, bahkan penyelenggaraan pendidikan madrasah juga men­jadi model pendidikan Islam yang patut ditiru oleh Negara-negara Islam di dunia. Meskipun demikian tidak di­pung­kiri banyak perhatian dari publik dan berbagai kritik kerap di­tuju­kan kepada kementerian ini, berkaitan banyak hal: mulai soal mana­jemen, profesionalisme, hingga korupsi dan gratifikasi yang ditujukan kepada penghulu di KUA. Keadaan itulah yang selalu me­mom­pa semangat berbagai jajaran di Kementerian Agama untuk terus meningkatkan kualitas layanan masyarakat dan perbaikan manajemen.

Pengelolaan pemerintahan akhir-akhir ini yang kerap men­dapatkan kritik, harus kita akui juga tertuju pada Kementerian Agama. Berkali-kali kementerian ini diterpa isu dan kabar menyedihkan, termasuk korupsi. Misalnya, ketika menyeruak isu korupsi yang berkaitan dengan pengadaan Al-Qur’an, publik menganggap Kementerian Agama tidak lepas dari praktik yang pelan-pelan akan menghancurkan negeri ini.

Kita harus *mafhum* pula jika masyarakat menjadi berang karena itu. Dalam kacamata publik, Kementerian Agama me­mi­liki perbedaan dengan kementerian-kemen­te­rian lainnya. Sandang “agama” pada kementerian ini menjadi tipologi yang khas dan berbeda.

Dalam pidato Hari Amal Bhakti ke-38, Munawir Sjadzali yang pernah menjabat Menteri Agama selama dua periode menguatkan dengan ujaran “*Ia (Kementerian Agama) lahir dari sejarah dan tuntutan bangsa yang berakar kokoh dalam tata nilai dan tata kemasyarakatan bangsa kita sejak zaman kerajaan Hindu-Budha, dan terutama setelah memasuki zaman kerajaan Islam*.”

Agama adalah sesuatu yang suci, sakral, dan men­jun­­jung moralitas. Kementerian Agama—dengan label sederhana saja—selalu diharapkan dapat mem­prak­tik­kan dan me­me­domani nilai-nilai agama. Sebab itu ke­ju­juran dan kepercayaan perlu ditanamkan dalam setiap benak manusia yang mengabdi untuk kementerian ini.

Hal tersebut sejalan dengan motto yang di­pedo­mani, yaitu “Ikhlas Beramal”. Motto ini tidak semata-mata menganjurkan setiap pegawai di bawah Kemen­te­rian Agama untuk berakti­vi­tas berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, tetapi juga di­dasari atas nilai-nilai ibadah.

Dengan latar belakang itu, maka Kementerian Agama me­nyandang beban rangkap. Selain beban se­ba­gai bagian dari institusi yang melakukan tugas penge­lo­laan atau pendeknya adalah tangan panjang negara, juga beban dengan menyan­dang entitas agama yang mem­buat publik secara umum ber­ha­rap Kementerian Agama dapat menerapkan nilai-nilai mo­ra­litas yang baik itu.

Dengan harapan, impian, dan barangkali beban itu, pe­nge­lolaan yang tidak selaras dengan cita-cita *good and clean gover­nance* menjadikan Kementerian Agama menjadi sasaran kritik yang lebih pedas dan tajam. Namun harus tetap di­pa­ha­mi bahwa segala kritik yang tertuju pada Kementerian Agama adalah wujud dari harapan dan ke­ingin­an masyarakat untuk me­lihat kementerian ini dengan wajah terbaiknya.

Prestasi

Tetapi di tengah berbagai kekurangan itu, tentu kita tidak dapat menutup mata terhadap berbagai prestasi yang telah diraih oleh Kementerian Agama. Dari ber­bagai segi, Kemen­te­rian Agama telah meraih prestasi-prestasi menggembirakan dan tentu saja juga patut men­dapatkan apresiasi.

Salah satu yang bisa disebutkan adalah keberhasilan projek Kementerian Agama pada MAN Insan Cendekia yang meraih prestasi pada level nasional dan inter­na­sional. Ini bisa menjadi potret perkembangan pen­di­dikan di tangan Kementerian Agama yang seringkali diragukan oleh publik karena hanya menghasilkan lulusan “kelas dua”.

Seperti kita tahu, lulusan-lulusan Madrasah sering diang­gap tidak sehandal dan kalah saing dengan lulusan sekolah umum. Hal ini kerap membuat publik merasa tidak yakin jika harus menyekolahkan anak mereka di sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama. Tetapi dengan prestasi MAN Insan Cendekia Serpong, sebagai salah satunya, yang keluar sebagai sekolah dengan nilai Ujian Nasional 2013 tertinggi kedua tingkat nasional, sekolah-sekolah Kementerian Agama tidak lagi dapat diabaikan.

Demikian pula dengan pengelolaan haji yang kian mem­baik dari tahun ke tahun. Barangkali sebagian me­dia dan publik merasa pengelolaan haji masih banyak kekurangan, tetapi kerap lupa terhadap kemajuan-ke­ma­juan yang telah dicapai. Diraih­nya WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) menjadi salah satu bukti tentang kinerja Kementerian Agama yang semakin baik dari hari ke hari.

Harapan Masyarakat

Mantan Menteri Agama RI, Prof. KH. Tholhah Hasan mengatakan, setidaknya ada 5 harapan umat terhadap Kemen­terian Agama, yaitu;

1. Menjadi kementerian yang bercitra bersih.

2. Bekerja professional dan akuntabel.

3. Memiliki kreatifitas yang tinggi dalam meng­ha­dapi perubahan dan tantangan.

4. Mempunyai kualitas produk yang kompetitif.

5. Mempunyai karakter yang adil dan arif dalam ke­bijakan dan perilaku birokratisnya.

Apresiasi terhadap kerja keras tersebut perlu dilaku­kan untuk terus memupuk optimisme setiap jajaran di Kemen­te­rian. Optimisme itu akan meng­han­tarkan pada sikap dan nilai kinerja yang lebih baik. Semoga hal ter­se­but mendapatkan ke­mudahan dan keberkahan dari Allah swt. *Amin*.

Bagian Pertama

NILAI-NILAI   
PENDIDIKAN ISLAM DALAM RITUAL KEAGAMAAN

- 1 -

HAJI SEBAGAI MODAL   
AKHIRAT

**TIDAK** begitu terasa musim ibadah haji segera hadir di hadapan kita. Calon jamaah haji mempersiap­kan diri untuk melaksanakan berbagai ibadah yang men­jadi syarat dan rukun haji. Seperti tahun-tahun sebelum­nya, jumlahnya cukup meng­gembirakan. Rea­li­tas ini menandakan bahwa ke­sadaran masya­ra­kat dalam me­lak­sanakan rukun Islam yang kelima itu sangat kuat. Padahal, untuk dapat menunaikannya diperlukan syarat dan pengor­ba­nan yang tidak ringan.Selain harus siap secara fisik dan mental, juga harus mengeluarkan harta yang tidak se­dikit jumlahnya.

Mengingat begitu besar dan beratnya pengorbanan me­lak­sanakan haji, maka wajar bila orang yang sudah berhaji ter­masuk orang istimewa yang berhak menyan­dang gelar haji dan mendapat balasan surga. Tetapi ha­rus kita pahami bahwa gelar haji bukanlah tujuan orang yang berhaji, karena itu hanyalah semata penghormatan masyarakat saja. Khususnya masyarakat Indonesia ter­hadap orang yang telah menunaikan ibadah haji. Yang justru dengan adanya gelar itu, harus diimbangi dengan peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan.

Hakekat dan tujuan ibadah haji hanyalah satu, yaitu se­ma­ta mengharap ridha Allah swt. Jangan sampai dalam melak­sana­kan ibadah haji ada niat sedikitpun selain menggapai ridha-Nya. Dalam beribadah haji kita harus ikhlas dan murni menunaikan panggilan-Nya. Jauh dari penyakit dan perbuatan dosa, *riya’*, *rafas*, *fusuq* dan *jidal*. Sehingga ibadah haji kita men­ja­di berkualitas. Tidak se­ka­dar menggugurkan kewajiban semata. Haji kita terhitung menjadi haji mabrur yang dapat di­terima Allah swt. dan akan memperoleh balasan surga.

Alhajjul mabruru laisa lahul jaza’un illal jannah.Faqiila, ma birrul hajjí ya Rasulallah? Faqaala: Ith’amut tha’aami wathay­yibul kalami.

“Haji mabrur itu tidak ada balasan lain, kecuali surga. Maka ditanyakan apakah haji mabrur itu ya Rasulullah? Beliau menjawab; memberi makan dan berkata baik”.**(HR. Ahmad** dari **Jabir)**

Modal akhirat

Makanya menjadi keniscayaan bagi seluruh umat Islam yang berangkat haji untuk men­jadi­kan *haji mab­rur* sebagai misi dan tujuan yang harus di­realisasikannya. Sebab hanya haji mab­­rurlah yang dapat menjadi modal di akhirat nanti. Di sisi lain, hanya haji *mabrur* jugalah yang memiliki banyak ke­utamaan-keutamaan.

Diantara keutamaan tersebut; *pertama*, orang yang ber­haji diampuni dosanya dan dosa orang-orang yang dimintakan am­punan. Tidak seorang pun berihram sejak pagi karena Allah seraya ber-*talbiyah* sampai teng­gelam matahari melainkan ma­ta­hari tenggelam bersama dosa-dosanya dan ia kembali suci dari dosa bagaikan waktu ia dilahirkan ibunya (HR. Ibnu Majjah).

*Kedua,* orang yang melaksanakan ibadah haji di­golong­kan sebagai seseorang yang berjihad di jalan Allah. Saya ingin berjihad di jalan Allah, maka Rasulullah saw. bersabda; mau­kah kau kutunjuki sebuah jihad yang tidak ada kesulitannya? Lelaki itu berkata: Ya, Rasu­lullah bersabda,“berhaji ke Baitullah” (HR. Sa’id bin Mansur). *Ketiga*, orang yang melak­sana­kan haji meru­pa­kan duta. Duta Allah ada tiga yaitu pa­sukan tempur, orang berhaji dan berumrah (HR. An-Nasa’i dan Ibnu Hiban). *Keempat*, biaya dalam keperluan haji me­nyerupai biaya *jihad fi sabilillah*. Ongkos dalam haji sama dengan ongkos dalam *jihad fi sabilillah* satu dirham akan di­lipat­gandakan men­jadi tujuh ratus lipat (HR. Ibnu Abi Syaibani dan Ahmad dalam *Musnad*-nya).

*Kelima,* orang yang berhaji dapat memberikan *sya­faat*. Ba­rang­siapa yang datang berhaji semata-mata ka­re­na Allah, maka dia diampuni dan diberi hak memo­hon­kan pertolongan untuk orang-orang yang didoakannya” (HR. Abi Mundir dan Abi Musa Al-Asy’ari). *Keenam*, orang yang sedang berhaji dibang­gakan oleh Allah ke­pada malaikat-Nya. Sesungguhnya Allah berbangga dengan malaikat-malaikat di langit tentang orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Dan *ketujuh*, orang yang me­­lak­sanakan haji tidak akan mendapatkan balasan, kecuali surga. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang setimpal kecuali surga (HR. Ahmad).

Menjaga kemabruran

Memang, untuk meraih haji *mabrur* sebagaimana uraian di atas tidaklah mudah, tetapi lebih sulit daripada itu adalah menjaga dan memelihara kemabruran itu sendiri. Utamanya menjaga kemabruran pada tiga aspek; kemabruran haji dalam kepribadian, kemabruran haji dalam ‘*ubudiyah* dan kemabruran haji dalam kehidupan sosial. *Pertama*, kemabruran dalam kepri­ba­dian harus tampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dimana setiap orang telah berhaji dituntut selalu ber­kepri­ba­dian yang Islami. Berakhlakul karimah dan memiliki sifat dan sikap terpuji seperti halnya sabar, syukur, tawakkal, *tasamuh*, pemaaf, *tawadhu’* dan lain-lain.

*Kedua*, kemabruran dalam ‘*ubudiyah*. Setiap orang yang telah berhaji dituntut senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya. Misalnya, ibadah shalatnya harus se­ma­kin rajin dan khusuk, tidak hanya shalat wajib saja, tetapi shalat sunnahpun demikian. Puasanya tidak hanya di bulan Ramadhan saja, namun puasa sunah Senin dan Kamis juga rutin dilakukan. Tahajud dan zikir malamnya harus bertambah kuat, mem­baca Al-Qur’annya semakin sering, selalu ber­shalawat dan lain-lain.

*Ketiga*, kemabruran dalam kehidupan sosial. Dalam kos­mos ini orang yang telah berhaji selama hidupnya jauh lebih penting daripada itu semua adalah selalu mencintai anak yatim dan fakir miskin. Bahkan khusus anak yatim hendaknya tidak sebatas memikirkan ke­bu­tuhan pokoknya saja. Masalah pen­ting seperti pen­didikan juga wajib untuk diperhatikan dengan serius dan penuh totalitas.

Peranan IPHI

Sebagai langkah menjaga kemabruran itu, peran Ikatan Per­saudaraan Haji Indonesia (IPHI) yang ke­pengurusannya sudah sampai tingkat kecamatan dan bahkan desa menjadi penting. IPHI diharapkan tidak hanya sebagai ajang silatur­rahim para haji saja. Tetapi lebih dari itu, dapat menjadi tempat dan sarana menjaga kemabruran haji para anggotanya. Di IPHI sesama haji bisa saling *amar makruf nahi munkar*. Saling memberi dan menerima masukan. Hingga tidak ada satupun anggota IPHI yang perilakunya tidak mencerminkan sebagai perilaku haji mabrur.

Mengingat salah satu kemabruran haji adalah aspek ke­hi­dupan sosial, maka keberadaan IPHI juga harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masya­ra­kat. Terutama manfaat dalam bidang pendidikan yang hing­ga kini kon­disi­nya belum sesuai dengan harapan kita bersama. Bila IPHI mau ikut memikirkan pen­di­dik­an secara serius, niscaya dunia pen­di­dikan akan meng­alami perubahan dan dituntut selalu peka terhadap lingkungannya. Ramah dan santun kepada sesama. Memiliki kepedulian dan kesetiakawanan sosial yang tinggi. Gemar membantu orang lain yang lagi kesusahan, baik ke­su­sah­an materi ataupun non-materi. Dan ke­ma­juan secara sig­ni­fikan. Apalagi sebagian besar anggota IPHI adalah orang-orang kaya di negeri tercinta ini.

Dengan peranan IPHI diharapkan bangunan fisik sekolah, sarana prasarana sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar yang selama ini masih menjadi problem serius, akan cepat ter­atasi. Sehingga kegiatan belajar meng­ajar (KBM) menjadi kon­dusif, yaitu lancar, aman, nyaman dan efektif. Dalam hal ini peranan IPHI juga sangat dibutuhkan. Misalnya saja dalam hal pening­ka­t­an mutu sekolah, budi pekerti siswa dan lain-lain. Per­tanyaan­nya sekarang, mampukah IPHI merealisasi­kan­nya? Akhirnya, selamat melaksanakan ibadah haji, se­moga menjadi haji mabrur. Amin. *Wallahu a’lam*.**[]**

- 2 -

RAMADHAN DAN INTERNALISASI ETIKA SHALAT

**KITA** patut bersyukur karena bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadhan yang kehadirannya selalu di­rin­dukan oleh segenap kaum muslimin di penjuru dunia. Sebab, tanpa ka­runia-Nya mustahil bagi kita dapat ber­jumpa lagi dengan bulan yang penuh *rahmah* dan *maghfirah* ini. Mari kita renung­kan se­je­nak betapa banyak saudara, sahabat dan keluarga kita yang saat Ramadhan tahun lalu masih bisa menikmati lezatnya ibadah, ternyata sekarang sudah tidak bisa lagi. Maka­nya bagi kita yang masih diberi karunia untuk berjumpa dengan Ramadhan, kiranya tidak ada alasan sedikitpun untuk tidak se­gera bersyukur.

Satu-satunya wujud riil syukur kita pada Allah swt. adalah dengan memperbanyak ibadah. Baik ibadah yang bersifat *mahdhah*, seperti halnya puasa, zakat dan salat wajib lima waktu, juga ibadah yang kategori *sunnah* se­per­ti halnya men­jalankan salat tarawih, tadarus, sede­kah, i’tikaf di masjid dan lain-lain. Berbagai jenis ibadah itu, di bulan yang suci ini kita tingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

Dari sisi kuantitas hendaknya lebih baik daripada bulan-bulan selain Ramadhan. Contohnya bila diselain Ramadhan kita jarang membaca Al-Qur’an, maka di bulan ini diusahakan setiap hari harus membacanya. Bila di luar Ramadhan kita jarang bersedekah pada fakir miskin dan anak yatim, maka di bulan ini sebisa mung­kin banyak bersedekah pada mereka.Bila di selain Ramadhan shalat kita masih sering bolong-bolong, maka di bulan ini jangan lagi dan seterusnya. Jadi mau tidak mau sebagai bentuk rasa syukur, maka wajib hukumnya untuk meningkatkan kuantitas ibadah kita.

Namun peningkatan kuantitas ibadah itu harus se­lalu dibarengi dengan aspek kualitasnya. Ibadah yang kita lakukan perlu benar-benar menjadi wahana untuk *taqarrub* pada Allah swt. Dan lebih daripada itu, *atsar­nya* kita harapkan dapat ter­cer­min serta terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Dimana ibadah yang semula hanya berdimensi vertikal ter­se­but dapat ber­kem­bang serta merambah ke ranah horisontal*.* Ibadah yang awalnya berada dalam kosmos *hablun min Allah* ber­kem­bang menuju kosmos *hablun min an-naas.* Dalam kon­teks Ramadhan ini, selain kita dituntut mening­kat­kan kua­li­tas ibadah puasa, juga dituntut untuk mening­katkan kualitas ibadah shalat.

Karena hal itu sangatlah penting mengingat shalat adalah ibadah yang nantinya pertama kali akan dihisab*.* Bila shalatnya baik, maka seluruh amal kita nanti juga akan dihitung baik. Begitu pula sebaliknya bila shalat kita ternyata jelek, maka pasti semua amal akan di­hi­tung jelek. Sabda Nabi Muhammad saw.:

“Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal perbuatanmu adalah shalat.”

Masih dalam hal yang sama Nabi Muhammad saw. juga bersabda:

“Shalat adalah tiang agama, barang siapa menu­nai­kannya ber­arti ia telah menegakkan agama, dan barang siapa meninggal­kan­nya berarti ia telah merobohkan agama.”

Makanya, dengan semakin baiknya kualitas dan kuantitas shalat kita di bulan suci Ramadhan ini, di­harapkan *atsarnya* akan dapat langsung terintegrasi kedalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, bila kebetulan kita jadi pemimpin maka akan selalu mempraktikkan etika kepemimpinan dalam shalat. Di­mana pemimpin (baca: imam) dalam shalat adalah harus jujur, amanah, *fathanah*, tegas, adil serta penuh tanggung jawab. Pe­mim­­pin dalam shalat juga harus mampu mengayomi dan men­ciptakan rasa tenang serta suasana *khusuk* terhadap jamaahnya. Se­bab bila seorang imam tidak mampu men­ciptakan suasana yang demikian, hakekatnya dia telah merusak kualitas ba­ngun­an shalat jamaah itu sendiri.

Begitu pula sebagai anggota masyarakat kita hen­dak­nya dapat mempraktikkan etika bermasyarakat (baca: makmum) dalam salat. Dimana etika menjadi makmum dalam salat adalah penuh ketaatan kepada imamnya. Disisi lain demi terea­li­­sasinya salat yang ber­mutu, makmum juga mempunyai ke­wa­jiban untuk mem­beri peringatan serta meluruskan imam bila me­la­kukan kesalahan. Dan dalam konteks ini, seorang imam harus mau mendengar serta melaksanakannya. Tidak boleh sedikit pun untuk menolaknya.

Demikian pula dalam kegiatan sehari-hari. Kita se­ba­gai masyarakat harus tunduk dan patuh atas per­atur­an peme­rin­tah. Sebagai warga negara kita harus melak­sa­nakannya dengan tulus dan optimal. Bila seluruh umat Islam pada Ramadhan ini mau dan mampu meng­implementasikan nilai-nilai yang ter­da­pat dalam ibadah salat itu pada kehidupan sehari-hari, niscaya perilaku yang tidak terpuji dan merugikan bangsa tidak akan mera­­jalela. Karena salat sesungguhnya memiliki ke­kuatan *tanha ‘anil fahksya ‘i wal munkar* (Al-Ankabut: 45).

Semoga dengan adanya peningkatan kualitas ibadah salat di Bulan Ramadhan ini, dapat membawa dan mengantarkan kita menjadi manusia yang selalu ber­tak­wa pada Allah swt. dan *berakhlakul karimah.* Yang akhir­nya nanti diharapkan bisa memberi manfaat bagi bang­sa, negara dan agama serta per­adaban dunia. *Wallahu A’lam.***[]**

- 3 -

*SADAQAH* DAN PUASA YANG BERKUALITAS

**BULAN** Ramadhan merupakan momentum bagi umat Islam sebagai ajang berbuat baik kepada sesama­nya, *fastabiqul khairat*. Pada bulan itu, ada suatu agenda tersendiri bagi umat Islam untuk saling berlomba-lomba mencari jalan yang diridhai Allah swt. Pelbagai agenda itu antara lain: menjalankan puasa, shalat tarawih, *tadarus* Al-Qur’an, hingga melaksanakan pel­ba­gai macam ibadah sosial dengan penuh rasa kesungguhan dan ke­ikhlasan.

Momentum pada bulan puasa ini pun semestinya diterap­kan dengan cara-cara yang serius. Hal ini didasari dengan niat tulus menjadi orang-orang yang beriman, ‘*imanan wahtisaban’* dan menjadi orang yang bertaqwa, ‘*laallakum tattaqun’*.

Dewasa ini, memang banyak orang yang melakukan puasa. Akan tetapi, mereka cenderung mendapatkan hikmah puasa dari rasa lapar dan dahaga saja. Hal ini se­mata terjadi lan­taran kualitas puasa yang tergolong ren­dah. Puasa dimaknai se­batas pada aspek fisik luar, di­mana mereka puasa dengan menahan lapar dan da­haga. Puasa tidak dilakukan lebih dari itu. Parahnya, kita juga terkadang menyadari akan realitas ter­sebut dan tidak berupaya meningkatkan kualitas keimanan kita.

Lepas dari itu, sesungguhnya jalan untuk mening­kat­kan ibadah puasa begitu banyak. Salah satunya dengan cara ber-*sadaqah*. *Sadaqah* bisa dipahami sebagai upaya menyisihkan atau memberikan sebagian harta yang kita miliki, tanpa adanya ka­dar tertentu yang di­sertai dengan keikhlasan hati untuk orang lain. *Sadaqah* diperuntukkan terutama bagi saudara-saudara kita yang tidak mampu, seperti fakir miskin, anak yatim dan lain-lain.

Hikmah *sadaqah* akan terasa lebih bermakna bila­mana kita secara luas bisa memaknainya lebih men­dalam, maka di situ kita akan mendapati keagungan agama Islam, melihat kemu­lia­an Islam dan menyadari posisi akan ketinggian Islam. Sebab, mak­na keikhlasan hati yang ditujukan kepada seseorang yang mem­bu­tuh­kan akan menyejukkan hati terdalam kita.

Dalam konteks demikian, sesungguhnya sadaqah dapat mempengaruhi kualitas puasa kita. Sebab, dengan sadaqah kita se­olah merasakan bagaimana keadaan orang miskin sesung­guh­­nya yang kondisinya tentu sangat mengenaskan dan tidak jarang mereka sehari-hari­nya hanya makan dua kali atau bah­kan hanya satu kali. Itu pun dengan seadanya, mereka mam­pu men­syu­kuri nikmat yang diberikan Allah.

Keadaan seperti itu jika dihayati dan direnungi, niscaya dapat mempengaruhi kualitas puasa kita di bulan Ramadhan. Betapa tidak, orang miskin sepanjang hidupnya bisa menerima kemiskinannya dengan ikhlas. Maka pertanyaan yang muncul, kenapa kita sebagai umat Islam yang setahun hanya dimintai satu bulan oleh Allah swt. untuk merasakan keadaan yang sama dengan orang miskin tidak mampu melaksanakan puasa dengan ikhlas?

Hal semacam itulah yang semestinya terus kita re­nung­kan di bulan puasa ini hingga menjadikan kita rajin untuk *sadaqah*. *Dus*, secara otomatis tentunya akan ber­implikasi pada kualitas (ibadah) puasa kita yang se­makin meningkat, menjadi puasa yang ideal, *ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi*. Oleh karena­nya, mengingat begitu pentingnya peran *sadaqah* dalam me­ning­katkan kualitas puasa, maka tidak ada pilihan lain kecuali ber­lomba-lomba dalam ber*sadaqah*.

Ada banyak keutamaan ketika kita ber*sadaqah* pada bulan Ramadhan ini. Umumnya, *sadaqah* digelar berupa sajian buka puasa diperuntukkan bagi anak-anak yatim piatu dan fakir mis­kin. Bahkan keutamaan *sadaqah* bisa lebih dari itu. Ketika kita mendapatkan keutamaan dari pemberian makanan buka puasa, kita juga mendapatkan tambahan keutamaan yang lebih bermakna, yakni ketika kita bersedia ikut andil bergabung dalam buka puasa bersama anak-anak yatim piatu itu, atau mem­baurkan diri di tengah-tengah mereka. Dengan cara ini, nis­­caya kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih bermakna dan bermanfaat, terutama dalam hal derajat keimanan dan kualitas puasa.

Keutamaan ini tidak berhenti sampai disini saja. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, kita bisa melanjutkan *sadaqah* bagi mereka dengan apa yang mereka harapkan dalam hari raya, pakaian baru. Dengan ini, maka sem­purnalah *sadaqah* di bulan suci ini. Untuk itu, perihal ini jangan sampai dilupakan, apalagi menge­nai pakaian baru. Sebab, jika mereka tidak mendapatkan *sadaqah* pa­kaian baru, dapat dipastikan pada hari raya (Idul Fitri) –hari yang penuh kegembiraan dan kebahagiaan–mereka malah bersedih hati.

Dari sini kiranya sudah jelas bahwa *sadaqah* pada bulan Ramadhan selain mendapat pahala yang ber­limpat ganda, juga sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Hal ini didasarkan kepada hadits Nabi Muhammad saw.,

”Barangsiapa membuat jalan berupa perbuatan yang baik, maka dia akan menerima pahala dari apa yang diker­ja­kan­nya, dan pahala dari orang-orang yang ikut me­nger­jakan perbuatan baik tersebut, terus menerus sampai hari kiamat tanpa dikurangi sedikitpun.”

Hadits tersebut jika kita renungkan dan amalkan, maka ditemukan suatu kandungan makna yang sangat indah. Lebih dari itu, hadis tersebut juga dapat menjadi pemicu semangat dan motivasi dalam mewujudkan pribadi-pribadi yang gemar *sadaqah* dan pribadi muslim yang peka terhadap masalah sosial, terutama problem kemiskinan dan penderitaan orang lain.

Mengingat *sadaqah* adalah ibadah yang erat hu­bungan­nya dengan tingkat keimanan dan ketakwaan seseorang, maka praktik *sadaqah* sejatinya merupakan wujud dari pribadi hamba yang mampu menemukan nilai-nilai ajaran agama Islam untuk beribadah sosial. Sehingga, apabila seseorang telah mempunyai jiwa atau hobi *sadaqah*, niscaya orang tersebut masuk dalam kate­gori *maqamkhairu an-naas* (tempat sebaik-baiknya manusia).

Dalam sebuah hadist Rasulullah saw.;

“Ketika anak adam telah mati, maka terputuslah semua amalnya, kecuali tiga hal, yaitu, sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang shalih yang mau mendoakan orang tuanya.”

Akhirnya, mari kita bersama-sama ber-*fastabiqul khairat* dalam bersedekah sebagai bentuk atau upaya meningkatkan kualitas puasa, sekaligus dicatat sebagai *amal jariyah* kita, yakni suatu amal yang dijanjikan nilai pahalanya tidak akan putus sampai kapanpun. Selamat bersedekah.[]

- 4 -

IDUL FITRI DAN PENINGKATAN   
AMAL SHALEH

**BULAN** Ramadhan telah kita lewati. Hari ini, kita mema­su­ki hari pertama bulan Syawal. Sebelum ter­lam­pau jauh meninggalkan bulan penuh berkah itu, kiranya akan sangat baik ketika kita bersama-sama melakukan evaluasi dan intro­speksi diri. Apa Hikmah atau pelajaran yang dapat dipetik dari ibadah puasa di Ramadhan?

Tentu, banyak pelajaran dan nilai-nilai pendidikan yang didapatkan ketika menjalankan ibadah di bulan Ramadhan. Ibadah ini sekaligus menghantarkan kita pada praktek-praktek kehidupan sehari-hari sebagai kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt. Hal ini juga diniscaya mampu men­jadikan negeri ini menjadi negara yang makmur, adil, dan beradab.

Ada banyak nilai pendidikan yang terkandung dalam prak­tek ibadah puasa. *Pertama*, pendidikan ke­ju­juran. Bahwa, pengalaman seseorang yang menjalani puasa Ramadhan me­ru­pakan pondasi kuat untuk meng­hantarkan seseorang memiliki kepribadian yang jujur. Pendidikan kejujuran melalui puasa merupakan model pendidikan kejujuran terbaik dari beberapa model pen­didikan yang telah ada.

Betapa tidak, tiap hari selama hampir 14 jam di­tun­tut untuk menahan lapar, dahaga, menahan hawa nafsu, dan lain-lain. Sementara itu, kesempatan untuk ber­peri­laku tidak jujur sangat terbuka lebar, karena tidak ada orang ditugasi meng­awasi kita, kecuali pengawasan lang­sung oleh Allah dan ke­sa­daran kita sendiri.

*Kedua*, pendidikan kedisiplinan*.* Orang yang ber­pua­sa me­mi­liki pengalaman dan mengandung nilai-nilai kedisiplinan yang lebih baik dari model pendidikan kedisiplinan lainnya. Sebab, kedisiplinan dalam ber­puasa didasari atas kesadaran, bukan karena keter­pak­saan atau pengawasan oleh pihak ter­tentu. Sehingga, seseorang niscaya tidak berani melanggar mes­ki hanya 2 menit untuk berbuka puasa terlebih dahulu, se­be­lum datang atau terdengar adzan maghrib.

*Ketiga*, pendidikan sosial. Orang yang berpuasa akan mera­sa­kan betapa beratnya menahan lapar dan dahaga di waktu siang hari. Di sisi lain, ada seseorang yang ber­ke­cu­kup­an uang, harta, dan kesempatan bagi mereka pun terbuka luas. Maka, pengalaman berpuasa akan me­lahirkan pribadi manusia yang peka terhadap kesulitan orang lain, terutama penderitaan fakir-miskin, anak yatim, dan sabilillah. Oleh karena itu, untuk mengakhiri puasa dan memasuki tanggal bulan syawal, umat Islam diwajibkan membayar zakat fitrah sebagai bentuk kepe­dulian terhadap sesama manusia yang membutuhkan.

Diantara renungan itu setidaknya menunjukkan bahwa nilai pendidikan dalam ibadah puasa mampu mereko­men­dasi­kan manusia menjadi insan yang ber­takwa. Dengan demikian, Idul Fitri merupakan mo­men­tum bagi kita untuk menambah kadar ketakwaan ke­pada Allah swt. Sebaliknya, Allah juga telah menye­dia­kan surga bagi orang yang bertakwa kepada­nya. Per­nyataan ini selaras dengan firman Allah swt.

“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertaqwa.” **(QS. Ali Imran: 133)**

Ayat selanjutnya dikatakan bahwa yang termasuk kategori golongan bertakwa adalah orang-orang yang peduli pada se­sama­nya dengan cara memberikan se­ba­gian hartanya untuk orang yang membutuhkan san­tunan. Allah swt. berfirman:

“Orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di wak­tu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang me­nahan amarah­nya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah meyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” **(QS. Ali Imron: 134)**

Dari sini, setidaknya dapat diketahui bahwa salah satu tanda-tanda orang yang meningkat kadar ketak­waan­nya adalah orang yang peduli pada sesamanya dengan penuh rasa ke­jujuran dan kedisiplinan. Oleh karenanya, jika seseorang telah ‘lulus’ puasa Ramadhan, maka dengan sendirinya sese­orang akan dikatakan kadar takwanya meningkat. Nah, ba­rang­­siapa yang mampu meningkatkan kadar takwanya, maka orang tersebut kian ringan ketika mengerjakan pelbagai ke­baik­an serta peningkatan amal shaleh pada bulan ini dan bulan-bulan berikutnya.

Salah satu bukti keberhasilan seseorang yang me­ning­kat amal shalehnya adalah orang kian jujur dan disiplin dalam segala profesi dan pekerjaan. Misalnya sebagai seorang pelajar, maka ia akan menjadi siswa yang tekun, jujur dan disiplin. Mes­ki tanpa diawasi guru sekolah atau diperintah oleh orang tua, ia dengan ke­hen­dak sendiri mampu belajar dengan ber­sungguh-sungguh, mengerjakan tugas dan ujian dengan jujur. Sehingga, hal inilah yang diniscaya kelak menjadi pe­mim­pin bangsa yang jujur, tidak korupsi, dan rakyat pun semakin mak­mur dan negaranya aman tentram. Sebagai se­orang pe­gawai negeri misalnya, ia akan berusaha menjadi pe­ga­wai yang jujur, tidak korupsi, disiplin bekerja—bukan karena takut atasan—. Akan tetapi, kejujuran dan kedi­si­plinan dilakukan atas dasar ke­sadaran sebagai wu­jud pengabdian kepada negara sekaligus sebagai bentuk pelayan kepada masyarakat. Ada juga sebagai seorang pedagang dan petani. Mereka juga akan melakukan pe­­ker­jaannya dengan rasa jujur dan kedisiplinan, seba­gai­mana disiplinnya orang berpuasa. Sehingga, rezeki yang diperoleh akan lebih mudah dan berkah, serta menjadi pribadi yang rajin berinfaq.

Maka dari itu, perlu diwujudkan suatu rasa ke­ju­juran, ke­di­siplinan, serta kepedulian sosial secara ber­ja­maah sebagai salah satu usaha yang benar dan tepat sesuai bimbingan ajaran agama. Oleh karena itu, untuk mencetak putra-putri kita men­ja­di pribadi yang jujur dan disiplin diperlukan suatu pen­di­dikan agama dan Al-Qur’an melalui model pendidikan pon­dok pesantren, pen­didikan madrasah, dan atau sekolah yang meng­ajar­kan agama Islam. Sebab, lewat bimbingan agama se­se­­orang menjadi lebih patuh dan taat menjalankan tugas secara ikhlas, jujur, dan disiplin, bukan karena keter­paksaan.

Selanjutnya, untuk menjadikan infaq lebih pro­duk­tif dan ber­­­daya guna untuk membantu mengatasi problem ke­mis­kinan, perlu didukung keberadaan Badan Amil Zakat (BAZ). Ke­beradaan BAZ dewasa ini semakin memantapkan peran so­sial umat Islam, dan secara nyata dirasakan man­faatnya oleh ma­syarakat. Akhirnya, di tangan generasi anak kita negeri ini men­jadi aman, adil, dan makmur, menjadi suatu negara dengan kategori *Baldatun Thayyibatun warabbun ghafur.*[]

- 5 -

MAKNA QURBAN DALAM PENDIDIKAN

**SEJARAH** qurban dan ibadah haji tidak dapat di­lepas­kan dari peristiwa penting yang dialami oleh Nabi Ibrahim as. be­ser­ta istri dan anak tersayang (Siti Hajar dan Ismail). Yaitu ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah swt. untuk me­nem­patkan Siti Hajar dan Ismail di suatu lembah yang tandus, gersang, tidak ada pe­pohonan dan sepi tidak ada penghuni se­orang pun. Seperti dikisahkan dalam Al-Qur’an surat Ibrahim ayat 37*.*

“Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian ke­turunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati,... **(QS. Ibrahim: 37)**

Imam Ibnu Abbas menjelaskan, ketika suatu saat Siti Hajar ke­habisan air minum hingga tidak bisa me­nyu­sui Ismail yang masih bayi, beliau mencari air kesana-kemari sambil lari-lari kecil antara bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali (*sekarang menjadi rukun haji yang disebut Sa’i*). Lalu Allah mengutus malai­kat Jibril mem­buat mata air Zamzam untuk keperluan Siti Hajar dan anak­nya Ismail. Kini lembah yang dulunya gersang dan tandus itu, atas izin Allah dan berkat do’a Nabi Ibrahim as. telah berubah menjadi kota yang kaya-raya, makmur, aman, dan damai (kota Makkah) seperti yang digam­bar­kan dalam Al-Qur’an.

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa, ‘Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri Mekkah) ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian’... **(QS. Al-Baqarah: 126)**

Setelah Nabi Ibrahim lulus ujian pertama sebagai­mana tersebut di atas, maka datang ujian dan cobaan yang kedua yang sangat berat. yaitu datangnya perintah Allah untuk me­nyem­belih putra kesayangannya Ismail. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, bahwa Allah meng­uji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang haq, agar ia mengorbankan putra­nya (Ismail) yang kala itu masih berusia 7 tahun.

Ismail adalah anak yang elok nan rupawan, sehat dan cer­das, harus dikorbankan dan disembelih dengan meng­guna­kan tangannya sendiri. Peristiwa qurban yang spektakuler ini di­kisahkan dalam Al-Qur’an.

“... (Ibrahim) berkata: ‘Wahai anakku! Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, Maka pi­kir­kanlah bagai­mana pendapatmu!’ Dia (Ismail) menjawab, ‘Wahai ayahku! La­ku­kanlah apa yang diperintahkan (Allah) kepadamu; insya Allah engkau akan akan men­da­pa­tiku termasuk orang yang sabar.” **(QS. Ash-Shaffat: 102)**

Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah. Iblis datang menggoda sang ayah, sang anak, dan sang ibu silih berganti. Akan tetapi Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail tidak tergoyah oleh bujuk rayu Iblis yang menggoda agar mem­­batalkan niatnya. Mereka tidak bergeming sedikit pun dan tetap berpendirian te­guh untuk melaksanakan perintah Allah, sehingga Nabi Ibrahim mengusir iblis dengan melempari batu juga diikuti oleh Siti Hajar dan Ismail. Peristiwa pelemparan batu untuk Iblis itu, kemudian menjadi salah satu rangkaian wajib haji yakni ***melempar jumrah***.

Setelah Iblis pergi, Nabi Ibrahim segera melak­sana­kan pe­rin­tah Allah untuk menyembelih Ismail yang te­lah siap dengan penuh *tawakkal* (pasrah). Dengan izin Allah, maka Ismail tidak tergores sedikit pun oleh pedang yang digunakan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Allah menyu­ruh menghentikan langkah­nya untuk tidak me­nyem­­be­lih Ismail, karena Allah telah me­ri­dhai mere­ka berdua yang pasrah (*tawakkal*) kepada-Nya. Seba­gai ganti atas keikhlasan mereka, maka Allah memberikan gelar ke­kasih Allah (*Khalilullah*) kepada Nabi Ibrahim, serta me­ne­busnya dengan penyembelihan seekor kam­bing, sebagai­mana diterangkan dalam Al-Qur’an.

“Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan Kami abadikan untuk Ibrahim (pujian) di kalangan orang-orang datang kemudian”. **(QS. Ash-Shaffat: 107-110)**

Peristiwa bersejarah yang telah dialami oleh Nabi Ibrahim dalam mengorbankan putranya Ismail itulah yang kemudian menjadi titik awal pertama syariat Qurban (Idul Qurban). Qur­ban yang diperintahkan ke­pada kita sekarang tidak lagi me­nyembelih anak kita, melainkan cukup menyembelih bina­tang ternak, seperti kambing, sapi, kerbau maupun binatang Qurban lainnya*.*

Pengorbanan Nabi Ibrahim as. yang tercatat dalam sejarah umat manusia itu, memiliki makna yang sangat besar dan man­faat yang luar biasa. Karena dari sejarah Nabi Ibrahim itu, lahir­lah kota Makkah dan bangunan Ka’bah sebagai qiblat umat Islam seluruh dunia. Disamping itu, sumber air zamzam se­ba­gai tonggak jasa seorang ibu dan anaknya yang sangat sabar, tabah, dan bersahaja (Siti Hajar dan Ismail) kini air zamzam tidak pernah kering, sejak ribuan tahun yang silam, sekalipun setiap harinya dikuras oleh ribuan umat Islam.

Pada akhirnya, kiranya dapat mengambil pelajaran dari pe­­ristiwa tersebut, antara lain:

*Pertama***,** Nabi Ibrahaim telah memberikan contoh kepada kita, bahwa sebelum mendapatkan gelar sebagai “Khalilullah” Nabi Ibrahim harus melewati dua ujian berat, yaitu (a) ujian berupa perintah Allah untuk me­ning­galkan istrinya Siti Hajar dan putranya Ismail di se­buah lembah yang gersang dan tan­dus. (b) ujian berupa perintah Allah swt.untuk mengor­ban­kan putranya Ismail. Dengan demikian, setiap ujian dan cobaan dari Allah termasuk menjalankan perintah meskipun terasa berat itu, pasti Allah telah merencanakan sesuatu yang terbaik bagi hamba-Nya.

*Kedua,* Siti Hajar istri Nabi Ibrahim telah mem­beri­kan con­toh sebagai seorang ibu yang bertanggung jawab, sabar, tabah dan bersahaja. Karena demi menjalankan pe­rintah Allah, Siti Hajar menerima keputusan Nabi Ibrahim dengan ikhlas, tidak pernah mengeluh, tidak pernah menuntut, juga tidak pernah putus asa dalam ber­juang untuk mendidik dan membesarkan putranya Ismail.

*Ketiga,* Ismail telah memberikan contoh sebagai se­orang anak yang patuh dan tunduk kepada orang tua, taat ibadah, dan sopan. Walaupun kehidupannya tidak bergelimang harta, tidak berada di kota metropolitan, justru Ismail tumbuh dan berkembang di sebuah lembah yang tandus dan jauh dari ke­ra­mai­an orang. Tetapi Ismail telah mem­buktikan menjadi pe­mu­da yang cerdas dansukses menjadi hamba pilihan (menjadi Nabi Allah).

*Keempat,* Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar telah mem­beri­kan contoh model pendidikan yang modern, dengan pen­de­­katan yang humanis, dan komunikasi yang interaktif-terbuka-egaliter. Sehingga Nabi Ibrahim tidak ber­tindak secara otoriter ketika akan menjalankan pe­rintah Allah untuk mengor­ban­kan Ismail, tetapi diawali dengan proses dialog yang baik bahkan Nabi Ibrahim juga minta pendapat dari Ismail yang statusnya sebagai anak kecil yang penurut.

*Kelima,* Nabi Ibrahim dan Siti Hajar telah mem­beri­kan contoh kepada kita, betapa pentingnya pendidikan bagi ke­hi­dup­an anak di masa mendatang. Bahkan Ke­luar­ga Nabi Ibrahim juga memberikan contoh, bahwa ma­teri pendidikan yang pertama dan utama adalah pen­di­dikan akhlak (karakter), yaitu pendidikan yang mene­kan­kan kesederhanaan, kejujuran, keterbukaan, keman­dirian, dan tanggung jawab.**[]**

Bagian Kedua

PENDIDIKAN ISLAM DALAM BINGKAI PENDIDIKAN NASIONAL

- 1 -

PENDIDIKAN ISLAM DALAM BINGKAI PENDIDIKAN NASIONAL

**DEWASA** ini, ketika kita membaca arah dan tujuan pen­didikan nasional seolah kita sudah cukup me­nge­ta­hui dengan jelas, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks demikian, pendidikan nasional dituntut selalu pro aktif mem­bangun sumber daya ma­nu­sia yang berkualitas. Baik dalam ra­nah kognitif, afektif maupun psikomotorik. Hal ini selaras dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3); “Pemerintah mengusahakan dan menyeleng­ga­rakan suatu sistem pendidikan nasional yang mening­kat­kan ke­iman­an dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka men­cer­das­kan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.”

Sejak awal kemerdekaan, kurikulum pendidikan na­sional sejalan dengan UUD 1945. Ia dirancang secara seimbang an­tara ma­teri umum dan materi agama. Dengan langkah ini, di­ha­rapkan kepada peserta didik untuk tumbuh menjadi gene­rasi bangsa yang cerdas dan berakhlaqul karimah. Maka dari itu, pas­ca terbebas dari penjajahan, para pemimpin serta para pe­rintis kemer­de­kaan seketika langsung mengajarkan pen­di­dik­an agama di sekolah-sekolah. Sebab menurut mereka, pen­di­dikan agama dinilai sangat penting. Hingga pada suatu waktu, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) terlontar sebuah usulan kepada pemerintah agar meng­adakan pem­ba­ha­ruan pendidikan dan pengajaran, dengan mem­­perhatikan se­lu­ruh persoalan, termasuk pen­didikan agama, madarasah dan pondok pesantren.

Atas dasar itulah, Menteri P & K membentuk Panitia Pe­nye­­lidik Pengajaran RI dengan SK-nya tanggal 1-3-1946 No. 104/Bhg dengan Ketua Ki Hajar Dewantara. Mengenai hasil ke­putusan rapat tersebut, memuat unsur pendidikan agama agar diberikan pada seluruh instansi pendidikan. Berangkat dari sini, kurikulum agama se­ma­kin mendapat perhatian khusus dan posisi yang strategis dalam sistem pendidikan na­sio­nal. Bah­­kan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pen­didikan Nasional, tertuang dengan sangat rinci pokok-po­kok kebijakan pembinaan pendidikan agama (Islam), yang me­liputi;

1) Pemerataan pendidikan agama Islam;

2) Peningkatan mutu guru pendidikan agama Islam;

3) Peningkatan Pelakasanaan proses pembelajaran pen­di­dikan agama Islam;

4) Peningkatan pengendalian dan pengawasan serta pe­la­yanan supervise pendidikan agama Islam;

5) Peningkatan keimanan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa;

6) Pengembangan pola pembinaan pendidikan agama Islam terpadu.

Hal yang sama juga tampak dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU itu disebutkan bahwa pendidikan agama men­da­patkan perlakuan serta posisi yang luar biasa urgen. Perlakuan ini di­je­laskan dalam Penjelasan Umum UU No. 20 Tahun 2003, yang menegaskan bahwa strategi pertama dalam melak­sana­kan pembaruan sistem pendidikan nasional adalah pelak­sa­na­an pen­di­dikan agama dan akhlak mulia.

Selanjutnya, dalam Pasal 37 ayat 1 mewajibkan pen­di­dikan agama dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Dalam pendidikan umum, seperti kejujuran dan aka­demik, profesi, vokasi, dan masuk dalam kategori pen­di­dikan agama. Penyebutan ini dimaksudkan agar agama mudah dibelajarkan secara luas ketimbang sekadar mata pelajaran agama. Dengan demikian, pendidikan agama minimal di­ben­tuk mata pelajaran pendidikan agama. Hal ini untuk meng­an­ti­si­pasi kemungkinan peniadaan pendidikan agama dengan alasan telah dibelajarkan secara terintegrasi.

Pada Pasal 12 ayat 1 huruf (a) juga mengamanatkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pen­di­dikan berhak men­dapatkan pendidikan agama yang sesuai dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Ke­ten­tuan ini setidaknya mem­pu­nyai tiga tujuan; *pertama*, untuk menjaga keutuhan dan ke­mur­nian ajaran agama; *kedua*, untuk menjaga kerukunan hidup umat beragama dalam naungan instansi pendidikan yang sama; *ketiga*, untuk menunjukkan profesionalitas dalam me­nye­leng­gara­kan proses pembelajaran pendidikan agama. Semua hal itu dirancang dan digagas agar pendidikan agama benar-benar mampu membawa peserta didik menjadi manusia yang cerdas dan berakhlaqul karimah.

PP Nomor 55 Tahun 2007

Kemudian untuk memberlakukan UU itu muncul Per­aturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dengan PP ini, secara sekilas halangan bagi pemerintah untuk membantu pendidikan agama ke depan nampak tidak ada lagi. Sebab, PP ini men­je­laskan bahwa pemerintah daerah diperbolehkan membantu pendidikan agama.

Pada pasal 6 ayat (2) dalam Penjelasan PP No. 55 ini disebutkan bahwa dalam hal penyediaan pengajar agama, tidak diperkenankan dilakukan oleh setiap sa­tuan pendidikan. Maka, menjadi tugas pemerintah un­tuk menyediakan tempat terselenggaranya pen­didikan agama, dengan menggabungkan peserta didik seagama dari beberapa satuan pendidikan. Kemu­dian, dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) juga dinarasikan jika pe­me­rintah wajib menyalurkan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang di­tutup ke satuan pendidikan lain yang sejenis. Hal ini diperjelas dalam penjelasan Pasal 12 Ayat (1), yang menerangkan bahwa pemberian bantuan sumber daya pendidikan meliputi; pen­didik tenaga kependidikan, dana, serta sarana dan prasarana pendidikan lainnya. Pemberian bantuan disalurkan secara adil kepada seluruh instansi elemen pendidikan keagamaan.

Dari isi PP Nomor 55 Tahun 2007 itu kiranya cu­kup jelas bahwa keinginan pemerintah untuk mem­bantu pendidikan agama sudah tidak ada halangan. Bahkan dalam hal ini, pe­me­rintah daerah diharuskan membantu kepada pihak pe­nyeleng­gara pendidikan agama di daerah­­nya masing-masing. Bantuan itu bisa berupa bantuan fisik ataupun non-fisik. Dalam hal fisik, pe­me­rintah daerah dapat turut serta mem­bangun tempat ke­giat­an belajar mengajar (KBM) pendidikan agama. Seperti hal­nya membangun gedung, melengkapi sarana pra­sarana pe­nunjang KBM dan berbagai fasilitas lain­nya. Sedangkan non fisik, pemerintah bisa membantu mencarikan tenaga pengajar, menyelenggarakan pe­la­tihan bagi guru pen­didikan agama, mem­beri ban­tuan buku-buku agama dan lain sejenisnya.

Untuk itu, adanya PP ini diharapkan kepada peme­rin­tah daerah untuk tidak ragu lagi membantu pen­di­dikan agama di daerahnya masing-masing secara mak­simal dan menyeluruh. Dengan peran aktif dan total se­perti itu, diharapkan pen­di­dik­an agama ke depan men­jadi pendidikan yang lebih baik, ber­kua­­litas dan mampu mengantarkan peserta didik menjadi ge­ne­rasi muda bangsa yang memiliki SDM tinggi dan ber­akhlaqul ka­rimah.

Hemat penulis, PP Nomor 55 Tahun 2007 ini nam­paknya lebih pantas jika disematkan sebagai kado De­par­temen Agama (Depag) di Hari Pendidikan Na­sional (Hardiknas). Semoga dengan PP ini pen­didikan nasional akan maju terus me­wu­jud­kan cita-citanya. *Wallahu A’lam.*[]

- 2 -

PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA PERSPEKTIF AGAMA

**DALAM** kajian agama, anak adalah amanah Allah yang harus dijaga dan dan dirawat sebaik-baiknya. Islam mene­kan­kan pentingnya pembinaan anak menjadi generasi yang sehat, kuat, dan berkualitas. Hal ini di­sebut­kan dalam Al-Qur’an,

“Dan hendaklah kamu merasa khawatir, kalau-kalau se­te­lah kamu akan muncul generasi yang lemah.”

Dengan demikian, mengurus anak menjadi suatu ke­wajiban tersendiri. Jika sang anak menjadi pribadi yang tidak berkualitas dalam beragama, maka ia ter­ma­suk kategori fitnah atau aniaya (*Innamaa amwaalukum wa aulaadukum fitnah)*. Maka, anak-anak harus di rawat, dididik, dan diarahkan secara baik, agar tidak menjadi generasi fitnah atau menjadi golongan yang teraniaya.

Dalam artian, merawat anak bisa berarti memberi ke­sempatan agar dapat hidup dan berkembang biak se­cara wajar, berpartisiasi dengan orang lain secara optimal sesuai harkat mar­tabat manusia, mendapatkan hak-hak­nya secara baik, meng­hargai pendapat anak, dan ter­hindar dari kekerasan dan diskriminasi. Melindungi anak bisa juga difahami sebagai upaya mewujudkan kua­litas anak Indonesia yang berahlak mu­lia, sehat dan se­jah­tera. Dan, anak harus dilindungi! Sebab, ia meru­pa­kan aset sumber daya manusia (SDM) pada masa depan sekaligus sebagai generasi penerus perjuangan bangsa.

\*\*\*\*\*\*

Sesungguhnya, kewajiban mengurus anak menjadi tang­gung jawab orang tua. Jika orang tua berani men­cam­pakkan anak, berarti ia telah melalaikan kewajiban mendidik anak. Kewajiban itu bisa meliputi; mem­beri­kan makan, memberi nama yang baik, mendidik agama yang kuat, membekali kete­ram­pilan yang cukup, dan menikahkan setelah cukup usia, dan banyak lagi lainnya. Banyak dari kita yang berlaku atau melin­dungi anak sedemikian rupa. Sehingga seolah-olah anak me­ra­sa dirinya dimanja. Sebaliknya, ada juga anak yang dijadi­kan ‘sapi perahan’ oleh orang tua untuk turut serta mem­­­bantu per­ekonomian keluarga.

Melindungi anak bukan berarti harus memanjakan. Dalam hal-hal tertentu, orang tua harus bersikap tegas (bukan keke­rasan) terhadap anak kalau ia menyimpang dari syariat. Misal­nya dalam hal ajaran shalat, orang tua boleh memukul anak. Dalam prinsip agama, perilaku orang tua dalam mendidik anak­­­nya bukan untuk me­nya­kiti, tetapi untuk menjerakan alias men­didik. Kebo­lehan oleh agama dibatasi pada anak yang te­lah berusia 10 tahun ketika ia belum melaksanakan ibadah shalat.

Maka, pendidikan akhlaq menjadi sangat relevan dan pen­ting. Anak harus menghormati orang tua dan sebaliknya, orang tua harus menghargai anak. Anak juga berhak mendapat per­lindungan orang tua, dan anak mempunyai kewajiban meng­hor­­mati orang tua. Anak yang berkualitas akan mem­ba­ha­­gia­kan orang tua. Nabi Muhammad memberikan peringatan ke­pada kita,

“Barangsiapa yang tidak menghargai yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua, maka dia tidak termasuk umat-Ku.”

Perlindungan kepada anak juga dilakukan Nabi Ibrahim as. Ia telah memberikan contoh bagaimana cara menghargai orang yang lebih muda, bahkan terhadap anaknya sendiri, Ismail. Perihal ini dicatat oleh sejarah dalam peristiwa Qurban. Dalam hal ini, Nabi Ibrahim meminta pendapat putranya Ismail, meski ia telah me­ne­rima wahyu dari Allah yang kebe­narannya tidak di­ragukan lagi. Jelas, dapat dipahami bahwa nabi Ibrahim tidak ragu atas wahyu Allah melainkan semata karena menghargai hak Ismail dalam hal berpendapat.

Perlindungan Negara

Dalam konteks bernegara, perlindungan terhadap anak diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002. Di sana disebutkan bah­wa anak adalah seseorang yang belum usia 18 tahun, termasuk yang janin yang masih dalam kandungan. Dalam kajian itu, ada substansi yang men­jelaskan tentang jaminan hidup dan ke­hidupan sewajar­nya bagi anak-anak dan keluarga. Sehingga anak-anak dan anggota keluarga mendapatkan hak-haknya secara wajar serta terhindar dari tekanan dan ancaman fisik, men­tal dari pihak yang lebih berkuasa, serta men­da­pat­kan pem­belaan hukum yang adil bagi pihak yang ter­aniaya.

Dari sini jelas, bahwa posisi anak dijamin oleh kon­sti­tusi yang menjamin seluruh masyarakat Indonesia sesuai harkat dan martabat manusia. Jika sang anak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan menjadi generasi yang berkualitas, yakni; sehat, kuat, dan ber­akhlaq. Harapannya agar tatanan hidup dan kehidupan bangsa Indonesia menjadi lebih ber­mar­tabat dan ber­akhlaq mulia.

Perlu ditegaskan sekali lagi bahwa UU ini selaras dengan ajaran Islam yang mencoba melindungi anak se­penuhnya, dan sarat dengan nilai-nilai universalitas agama.

Namun demikian, jaminan dari konstitusi ini belum ber­jalan secara efisien. Banyak dari anak-anak Indonesia yang na­sib­­nya belum beranjak baik, serta kondisi hidup­nya menjadi terancam. Sehingga dari sinilah ada upaya legislasi untuk men­dorong kemunculan Undang-Undang demi melindungi anak.

Kasus yang jamak terjadi pada anak di tengah ma­sya­rakat sesungguhnya disebabkan banyak hal. Dian­tara­nya, karena sisi negatif teknologi komunikasi dan informasi, dorongan eko­no­mi dan kemalasan orang tua, emosi orang tua yang tidak ter­ta­han, kesalahfahaman, keburu nafsu, dijadikan sasaran objek persentuhan dan banyak lagi lainnya.

Perkembangan teknologi informasi selain memberi hi­bur­an kepada kita, ia juga mempunyai efek samping yang sangat tinggi. Dengan teknologi informasi, sang anak bisa berbuat apa saja, positif maupun negatif. Namun, secara umum sang anak lebih ‘suka’ menam­pil­kan sisi negatifnya. Sang anak bisa men­ja­di korban ke­kerasan fisik dari temannya sendiri (meniru adegan dari tayangan TV), korban seksualitas teman sendiri (men­­coba seperti halnya main di film porno), korban sodomi, dan lain-lain.[]

- 3 -

KURIKULUM 2013 DAN PROBLEMATIKANYA BAGI GURU

**TAHUN** 2013, telah diberlakukan suatu kuri­kulum baru yang menitik beratkan pada aspek karakter dengan pendekatan saintifik dan penelitian outentik. Kurikulum ter­se­but diberi nama kurikulum 2013 atau sering disebut kurtilas. Sebelumnya, kurikulum yang dipakai masih meng­guna­kan ku­ri­kulum ta­hun 2006 yaitu kuri­kulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Kedudukan kurikulum dalam proses pendidikan ter­bilang penting. Ia menempati posisi strategis. Ia bahkan men­jadi in­dikator utama penentu arah keberhasilan pendidikan.

Bagi sebagian pihak, kurikulum 2013 memiliki mak­na yang strategis bagi kemajuan pendidikan ketika kurikulum ini di­pa­hami secara benar dan disikapi secara wajar oleh pe­mang­ku pendidikan. Maka, kurikulum yang masih baru tersebut musti dipahami dandisiapkan secara sung­guh-sungguh. Telaah bisa dilakukan dengan berbagai cara, termasuk melakukan pre­dik­si dan per­siap­an secara matang terhadap segala sesuatu yang ber­hu­bung­­an dengan pembelajaran di madrasah. Meski demi­kian, perubahan kurikulum ini mengundang reaksi bera­gam dari masyarakat. Ada yang setuju dengan segala re­si­ko dan optimis, ada pula yang setuju dengan ter­pak­sa dan pe­simis, dan ada yang bersikap cuek, apatis dan sinis.

Kurikulum Baru dan Problem Guru

Kurikulum pendidikan dalam suatu negara selalu ber­­ubah sesuai tuntutan zaman. Dari sinilah kemudian dicanangkan suatu kurikulum yang selalu bergerak se­suai tuntutan ma­sya­ra­kat pengguna jasa pendidikan. Tujuan perubahan kurikulum adalah yang sangat pen­ting, yaitu ketika seseorang lulus dari satuan pendidikan diharapkan dapat melakukan adaptasi dengan perkem­bangan zaman dan tidak lagi ‘gagap’ ter­ha­dap kemajuan teknologi dan in­for­masi. *Syukur*, apabila ia mampu men­jadi penggerak bagi masyarakatnya.

Sejatinya, perubahan kurikulum 2013 ini bukan semata-mata merupakan pergantian total terhadap kurikulum yang te­lah ada sebelumnya. Ia hanya sekedar meng­­geser tujuan pen­di­dikan yang semula menonjolkan aspek kecerdasan (*kognisi*) anak dengan menambah aspek-aspek lain. Namun dalam kuri­kulum yang baru ini lebih menekankan aspek sikap (afeksi) dan tingkah laku anak yang menjadi pertimbangan utama me­nen­tu­kan kelulusan peserta didik.

Jika ditengok sekilas, Kurikulum 2013 merupakan sepe­rang­kat tin­dakan yang menekankan pencapaian pada ranah pendidikan (afektif, psikomotorik, dan kog­ni­tif) yang di­laku­kan secara wajar dan proporsional. Sehingga, ke­ber­hasilan pen­didikan diukur dari sikap dan kepribadian peserta didik, baru mempertimbangkan ke­mam­puan dan pengalaman peserta didik dalam mema­hami mata pelajaran.

Implikasi perubahan kurikulum paling tampak kena ge­tah­­nya adalah guru. kini, ia tidak lagi hanya bertugas mem­beri­kan materi pelajaran di kelas. Namun juga di­tun­tut untuk menyiapkan perangkat pembelajaran se­suai kemampuan pe­ser­ta didik, memilih model pem­be­lajaran saintifik dan me­nyiap­kan perangkat peni­lai­an autentik, dan sekaligus men­ciptakan kondisi pem­bela­jar­an yang kondusif.

Tugas guru di era kurikulum 2013 ini terbilang cu­kup berat ketimbang model kurikulum lama. Di sam­ping itu, me­tode pem­be­lajaran tidak diperkenankan hanya berkutat pada ce­ramah. Ia *musti* juga meng­gunakan media pembelajaran dan referensi yang cukup ketika menyampaikan materi, sehingga pembelajaran tidak terasa kering karena kaya referensi. Mes­ki­pun pemerintah telah menyiapkan buku ajar bagi siswa dan buku panduan mengajar bagi guru.

Problem lain yang muncul, bahwa keberhasilan pelak­sa­na­an kurikulum 2013 di­ha­dap­kan pada kom­pe­tensi dan kualitas guru yang belum standar. Secara sederhana, problem guru dalam pe­laksanaan kurikulum 2013 ini dapat dipetakan; *Pertama*, penyusunan silabus dan rencana program pem­be­la­jaran (RPP). Bagi guru, penyusunan RPP model pembelajaran sain­tifik yang menjadi ciri khas kurikulum 2013 meru­pa­kan problem utama dalam pembelajaran. Hal ini di­kare­nakan guru belum terbiasa menyusun RPP, di samping itu kemam­puan guru sangat terbatas.

*Kedua*, penyusunan perangkat penilaian model auten­tik untuk mengukur sikap dan perilaku peserta didik juga meru­pa­kan problem yang tidak ringan. Pada umumnya, se­ba­gian besar guru tidak mempunyai penga­laman menyu­sun alat eva­luasi sendiri. Sebab, alat eva­luasi seperti ujian semester, ujian ke­naikan kelas biasa­­nya sudah di­terima dalam bentuk naskah jadi. Hanya bebrapa guru saja yang ditugasi menyusun alat evaluasi.

*Ketiga*, memilih metode mengajar yang tepat dan ber­va­riasi. Bagi sebagian guru, ‘mengajar’ hanya dimak­nai sebagai transfer pengetahuan. Maka, metode meng­ajar­nya pun lebih cenderung ceramah. Padahal pem­be­lajaran model kurikulum 2013 dituntut adanya peng­amat­an, observasi, dan menganalisis sebagai ciri pembe­la­jaran saintifik. *Keempat*, keterampilan meng­­gunakan media pembelajaran. Dalam era teknologi se­perti se­karang ini, sudah tidak elok jika seorang guru mengajar hanya mengandalkan papan tulis dan kapur. Disamping model ini tidak lagi menarik bagi peserta didik, juga sangat lamban dalam mengembangkan proses pem­be­lajaran autentik. Maka guru harus melek teknologi dan pihak madrasah wajib menye­diakan media pembelajaran yang canggih.

Banyaknya tuntutan ini, maka guru mempunyai kom­pe­ten­si dan beberapa ketrampilan dalam rangka meng­atasi pro­ble­matika itu. Salah satu *skill* yang penting adalah menyiapkan bahan ajar dalam bentuk *power point* dan menulis modul ajar. Sebab, guru tidak hanya berceramah dalam kelas, ia juga di­be­ba­ni banyak hal ter­kait tulis-menulis. Sehingga, ke­te­rampilan me­nulis bagi guru merupakan satu hal yang perlu mendapat per­hatian.

Dengan demikian, keberadaan guru memiliki ‘magnet’ peranan yang sangat strategis. Bahkan bisa di­kata­­kan sebagai ‘simbol’ keberhasilan kurikulum 2013 ini. Meski begitu, pe­ranan guru yang menonjol itu bu­kan satu-satu­nya alasan utama, pihak pengelola mad­ra­sah dengan ma­na­jemennya juga menjadi sumbangsih tersendiri ke­ber­hasilan kurikulum yang masih seumur jagung ini.**[]**

Bagian Ketiga

MENGGAGAS MADRASAH   
MAJU

- 1 -

KIAT SUKSES MEMBINA MADRASAH

**DEWASA** ini, madrasah dicitrakan sebagai lembaga yang unggul, populis dan Islami. Tak pelak, adagium ini menjadi per­­hatian serius bagi segenap pengamat dan praktisi pen­di­dikan di Indonesia. Membina pendidikan madrasah dituntut untuk kerja kolektif. Sebab, di sana tidak ditemukan seorang yang ‘sukses’ dengan berdiri sendirian.

Begitu halnya dengan lembaga yang menginginkan ke­suk­sesan. Ia tidak bisa mencapai puncak karir jika lem­baga itu tidak menjalin kerjasama dengan pihak lain. Oleh karena­nya, agar visi madrasah bisa sukses, diper­lu­kan kerja keras disertai kekompakan tim dan jaringan yang luas.

Namun demikian, madrasah terlihat masih mem­pu­nyai banyak kekurangan dalam segala hal. Diantara yang terlihat adalah pengandaian peran dalam praktek keseharian yang se­lama ini terjadi. Misalnya, pengelola madrasah lebih suka main catur dari pada main bola; lebih suka menon­ton daripada ber­main; memberi perin­tah ketimbang memberi contoh; lebih suka me­nya­lah­kan daripada mem­perbaiki tindakan; suka menuduh daripada meng­kla­rifikasi; lebih menonjolkan gengsi daripada meraih prestasi; suka memilih diam daripada berbicara tapi takut salah; memilih teman yang penurut daripada teman yang kreatif; dan lebih memilih ditegur daripada menegur seseorang yang melakukan kesalahan.

Banyaknya catatan ini setidaknya turut menambah citra buruk madrasah yang sekarang ini sarat dengan basis tradi­sional­nya. Satu sisi, memang benar jika tiap-tiap madrasah tidak mempraktekkan hal itu. Akan te­tapi, hal-hal yang demi­kian kiranya perlu dihindari agar madrasah menuai kesukesan di masa depan.

Untuk itu, ada kiat-kiat sukses untuk membina mad­­rasah. *Pertama*, mengenali kepribadian atau karakter teman. Menge­na­li karakter menjadi penting. Sebab, ia menjadi sentrum pertama dalam penjajakan tim. Tanpa mengetahui karakter seseorang, tim kerja akan ter­ganggu.

*Kedua*, mengkrompromikan visi dan misi madrasah. Hal ini juga menjadi penting adanya. Jika visi dan misi menjadi sealur, secara tidak langsung proses pembinaan madrasah da­pat terlaksana dengan baik. Sebaliknya, jika pada awalnya tim kerja sudah mempunyai visi dan misi yang berbeda-beda, maka kerja tim juga akan mengalami gangguan. Sebagian dari mereka ketika menjalankan tugas lebih didasari untuk men­jalan­kan niatan pribadi, daripada visi madrasah. Nah, visi dan misi dari tim kerja terlebih dahulu disesuaikan, agar kerja tim menjadi lebih efisien.

*Ketiga*, mempunyai kemauan dan motivasi yang sama untuk menyukseskan madrasah. Minimnya par­ti­sipasi dari tim akan mengakibatkan proses pembinaan menjadi tersendat. Be­gitu pula dengan motivasi tim. Tanpa adanya dorongan serta keinginan yang kuat, proses itu tentu akan berjalan lambat.

*Keempat*, saling terbuka, saling mempercayai sesama ang­go­ta tim. Tanpa adanya sifat itu, akan sukar mem­ben­tuk ke­kom­pakan tim. Ketika sesama anggota tim tidak saling mem­per­cayai dan tidak bersifat terbuka, maka secara tidak langsung mereka lantas berjalan secara sendiri, kadangkala bersikap egois dengan anggota lain. Sifat keterbukaan ini perlu diton­jol­kan di depan, agar nantinya ketika dihadapkan suatu masalah, hal itu akanmenjadi masalah bersama, dan diselesaikan secara bersama-sama.

*Kelima*, membangun komitmen bersama. Kita sadar bahwa komitmen mempunyai tempat dasar bagi ke­kompakan tim. Dengan adanya komitmen bersama, segala bentuk rintangan akan mudah terselesaikan. Komitmen bisa muncul dari pel­bagai cara, asal didasari atas keinginan bersama untuk me­ma­ju­kan madrasah.

\*\*\*\*

Sesungguhnya, ada banyak fungsi bagi madrasah untuk membentuk tim kerja. Tim bagi madrasah bisa ber­fungsi se­ba­gai pemikir dan perancang madrasah, sebagai motor dan ge­ne­rator madrasah, sekaligus sebagai bengkel madrasah. Salah satu manfaat yang bisa dipetik adalah menjaring *input* maha­siswa, meningkatkaan sumber daya manusia kepen­di­dik­an, mendistribusikan alumni atau *out put* madrasah, mening­kat­kan sumber dana kependidikan, serta sebagai sarana pen­dukung ke­majuan madrasah.

Makin sentralnya peran tim kerja itu, setidaknya bagi pi­hak pengelola madrasah *musti* cermat dalam me­mi­lah anggota-anggota tim kerja yang mempunyai mo­dal dasar dan ko­mit­men yang kuat untuk memajukan madrasah. Tim kerja mad­rasah bisa dikelompokkan men­­jadi beberapa bagian. Ia bisa meliputi unsur pim­pinan madrasah; guru, karyawan atau­pun siswa ataupun dari pakar pendidikan; pengusaha, birokrat.

Sebuah tim kerja harus pula membangun sebuah jejaring kerja yang kuat, termasuk menjalin kerjasama dengan pihak luar. Membangun jaringan kerja dapat dilaku­kan dengan ber­ba­gai cara. Langkah yang paling mudah adalah melakukan kon­tak atau hubungan dengan lembaga pendidikan lain, se­misal Perguruan Tinggi (PT), Lembaga Penjamin Mutu Pen­didikan dan Diklat (LPMP dan Balai Diklat Keagamaan). Atau juga bisa membangun mi­tra dengan perusahaan, pemilik mo­dal (*investor*) dan lain sebagainya.

Selain itu, tim kerja itu juga perlu menjalin ker­ja­sama dengan ormas-ormas keagamaan, semisal Nahdlatul Ulama’, Muhamadiyah, Persis, Al-Irsyad dan lain sebagainya serta mem­­bangun jejaring dengan peme­rin­tah (pusat dan daerah), DPR, Tokoh Masyarakat, Orang tua Murid, Tokoh Pemuda, dan lain-lain. Makin kompleksnya pekerjaan tim kerja mad­ra­sah ini harus serta merta dijalani secara kolektif, agar madrasah kian bersinar**.[]**

- 2 -

POSISI MADRASAH DALAM OTONOMI DAERAH

**SALATIGA** adalah kota kecil dari wilayah Provinsi Jawa Tengah. Ia berada di sebelah selatan kota Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Konon, di daerah itu dikenal publik sebagai kota ber­basis pendidikan, yang meliputi pendidikan agama dan umum. Pendidikan di­jadi­kan *human invesment* dalam mewu­jud­kan kualitas sumber daya manusia menuju keberhasilan pem­bangun­an. Tak heran, jika peran pendidikan di sana me­mi­liki fungsi yang cukup strategis guna menyiapkan tenaga ahli dalam merancang, mengelola, dan memelihara wilayah kota Sala­tiga yang maju, aman, damai, dan sejahtera.

Pendidikan agama sebagai landasan spiritual dan sis­tem nilai sangat berperan bagi kemajuan suatu daerah. Kegagalan memahami agama bisa mengakibatkan mun­culnya kerusuhan dan aksi sosial yang anarkis, seperti yang terjadi di Kaliman­tan Barat, Maluku, Sulawesi Tengggara, Nusa Teng­ga­ra Barat (NTB), dan Papua.

Pada masa penjajahan, keberadaaan madrasah cen­derung di­ang­gap sebagai lembaga pendidikan Islam informal yang digalakkan di rumah penduduk atau di masjid. Pada fase selanjutnya, lembaga pendidikan ini beralih fungsi men­jadi sejenis lembaga pengajaran yang basisnya di ling­kungan pe­san­tren. Umumnya, lembaga itu ber­ben­tuk klasikal yang kemu­dian disebut madrasah*.* Di tataran mad­rasah inilah, lokus utama pendidikan dimak­si­malkan pada masalah agama. Pen­didikan di mad­rasah ini tidak bersifat kooperatif dengan peme­rin­­tahan ko­lo­nial Belanda, sehingga ia tidak pernah sekalipun me­nerima subsidi dari pemerintah kolonial.

Pada fase selanjutnya, yakni masa kemerdekaan, madrasah sudah berbentuk klasikal dengan pola mana­jemen yang lebih baik. Ia juga ’sempat’ mendapatkan pengakuan resmi pemerin­tah dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri; Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebu­da­yaan, dan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 24 Maret 1975 yang isinya tentang status madrasah disamakan dengan status sekolah. Artinya, posisi madrasah baik MI, MTs, dan MA di bawah naungan Kementerian Agama se­pe­nuh­nya telah diakui dan disejajarkan dengan pendidikan sekolah SD, SMP, dan SMA yang di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional.

Pada masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid ke-2 ini, madrasah sudah meng­ajarkan semua pe­la­jaran umum, seperti halnya yang ma­teri yang diajarkan di SD, SMP maupun SMA. Penye­leng­garaan madrasah pun telah disamakan dengan pen­didikan yang ada di sekolah umum, hak dan tanggung­jawabnya tidak jauh berbeda. Madrasah juga diseleng­garakan dengan sistem pendidikan yang lebih baik ter­masuk menggelar Ujian Nasional dan di­akreditasi oleh pemerintah.

Pada waktu ini, kedudukan madrasah justru malah se­makin kuat dengan terbitnya UU Nomor 20 tahun 2003 ten­tang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Di mana dalam salah satu pasal 17 ayat 2 disebutkan, bahwa “Pendidikan dasar ber­bentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.”

Meski demikian, perhatian pemerintah terhadap madrasah agak berkurang pada masa otonomi daerah. Hal ini tidak lepas dari keberadaan madrasah yang di­tafsirkan sebagai bagian dari agama yang tidak di­otonom­­kan. Sehingga, pemerintah daerah tidak dapat memberi subsidi kepada madrasah.

Akan tetapi, seiring bergulirnya waktu, perhatian peme­rin­tah mengalami perubahan yang cukup signifi­kan. Pemerintah memberikan bantuan insentif bagi guru madrasah dan reha­bi­litasi gedung madrasah. Atas dasar pasal 1 ayat 18 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa, “Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pe­me­rintah daerah.”

Hal ini diperkuat lagi dengan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 903/210/RAKD, tanggal 27 pebruari 2006 tentang Dukungan dana APBD. Pada SK menteri dalam negeri itu, yakni item 2 disebutkan; “Untuk mensuk­ses­kan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan untuk mendukung pe­nye­leng­gara­an proses belajar mengajar pada jenjang pen­di­dikan me­nengah atas, penyediaan kredit anggaran melalui APBD untuk mendanai kegiatan belajar mengajar pada sekolah-sekolah yang dikelola oleh masyarakat termasuk yang ber­basis keagamaan seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah. Prinsipnya tetap dapat didanai melalui APBD sepanjang pendanaan yang bersumber dari APBN belum memadai.”

Berdasarkan ketentuan ini, maka madrasah sebagai pe­nyelenggara pendidikan mempuyai tanggung jawab dalam me­­layani kepentingan masyarakat dalam men­cer­daskan bang­sa, dan sebaliknya, pemerintah daerah ber­kewajiban mendanai mad­rasah melalui APBD.

Dalam sistem pendidikan di Indonesia, penye­leng­garaan pendidikan mad­rasah mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP nomor 19 ta­hun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Umum­nya, pelaksanakan pendi­dik­an di mad­rasah sama dengan pelaksanakan di sekolah umum. Bahkan dalam hal kurikulum, madrasah di­gadang-gadang lebih mumpuni atau lebih lengkap ketimbang sekolah umum. Sebab, kurikulum madrasah me­muat 100 % materi umum dan 100 % materi agama. Sedang­kan sekolah umum, tidak demikian.

Dengan adanya materi yang berlipat itu, secara tidak langsung pelaksanaan pendidikan di madrasah meng­alami kendala yang cukup berat, terutama padatnya muatan kuri­ku­lum, kompetensi guru, dan penataan kelembagaan. Untuk itu, diperlukan suatu terobosan baru yang sesuai dengan kultur madrasah guna meng­atasi banyaknya muatan kurikulum, serta menambah jam pelajaran yang mengarah pada *one day school*.

Dan untuk menanggulangi lonjakan pengajar yang belum sesuai dengan persyaratan perundang-undangan, selayaknya ditempuh melalui jalur pelatihan pening­katan kualitas guru yang fokus utamanya berkisar pada pengayaan materi pem­be­lajaran dan metodologi pem­belajaran. Untuk itu, perlu di­se­leng­garakan juga pela­tihan manajemen administrasi dan ke­uangan yang menge­depankan aspek modernisasi dan spiritual untuk penataan kelembagaan madrasah.**[]**

Bagian Keempat

PENDIDIKAN PESANTREN BERBASIS KARAKTER

- 1 -

PESANTREN DAN PERUBAHAN   
SOSIAL

**MEMBINCANG** tentang pesantren sebenarnya bukan hal yang baru. Sebab, kajian itu telah diulas oleh banyak ahli dan para peneliti terdahulu. Tetapi, secara khusus pembahasan tentang pesantren dan relevensinya dengan perubahan sosial belum banyak dibahas, apalagi pada telaah kurikulum pe­santren dengan perubahan masyarakat.

Pendidikan Pesantren dan Perubahan Sosial

Pendidikan merupakan komponen dasar dalam pem­bangunan dan sebagai pondasi utama dalam proses perubahan sosial. Josept S. Szyliowies mengatakan, pen­didikan meru­pa­kan kekuatan inovatif yang dapat digunakan untuk proses perubahan di masyarakat. Sebab, dengan pendidikan saluran penting yang me­nyang­kut gagasan dan nilai-nilai baru dapat muncul sekaligus memiliki dampak yang cukup besar bagi ke­hidupan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan dapat me­ru­bah tatanan masyarakat, baik pada pola ma­sya­rakat yang di­pengaruhi oleh modernisasi. Ia dengan lantang menegaskan bahwa keberhasilan lembaga pendidikan merupakan kunci keberhasilan modernisasi, (Josept S.Szyliowies: 200:3).

Sesungguhnya, pesantren sebagai basis pendidikan Islam tradisional di Indonesia telah berhasil menggerak­kan ma­sya­rakat dalam melakukan pembinaan ling­kungan dan perubahan masyarakat. Bahkan pada masa penjajahan, aktivitas pesantren berhasil mengusir pen­ja­jah dari tanah air sehingga Indonesia merdeka pada tahun 1945, (Ziemek: 1996: 3). Disamping itu, ko­mu­nitas pesantren telah berhasil melakukan perubahan sistem pendidikan yang tradisional mengarah pada pendidikan yang modern. Pesantren dijuluki sebagai lembaga tradisional, sebab lembaga pendidikan ini dikembangkan dari tradisi yang sangat kuat di ling­kung­an masyarakat Indonesia, bahkan pesantren merupakan salah satu simbul budaya pendidikan asli Indonesia yang dikembangkan dari tradisi pendidikan ke­agama­an. Dimana aktivitas pendidikannya semata-mata di­fokus­kan pada kajian kitab-kitab klasik yang mengarah pada *tafaqquh fiddin*, yakni pendalaman pengalaman, per­luasan penge­tahuan, dan penguasaan khazanah ajaran Islam. Se­hing­ga, pendidikan pesantren diberi sebutan sebagai lembaga pen­didikan yang tradisional, kolot, dan terbelakang, (Fuad Jabali: 2002: 94).

Pada awal abad XX, julukan ‘tradisional’ yang me­lekat pada lembaga pendidikan pesantren. Kini, label itu sudah tidak lagi relevan untuk zaman sekarang. Sebab, julukan itu ber­kurang sudah berkurang untuk men­jelas­kan fenomena atau realitas sosial yang ada. Meski de­mikian, karakteristik pe­san­tren perlu dipertahankan, agar tidak terjebak ke dalam sikap eksklusif yang anti kemajuan karena adanya tuntutan moder­ni­sasi, kontak dengan budaya luar.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sikap terbuka, toleransi dan sebagainya atau seringkali disebut mo­der­nisasi. Modernisasi merupakan cara pan­dang terhadap suatu hal atau peristiwa yang menem­pat­kan faktor mentalitas manusia menjadi penyebab per­ubahan dalam kehidupan ma­syarakat, (Agus Salim: 2002: 67). Oleh karena itu, moder­ni­sasi pendidikan pesantren perlu dimaknai sebagai suatu proses per­ubah­an tatanan kehidupan pesantren dari yang tradisional menuju tatanan kehidupan yang lebih maju dan modern.

Masyarakat yang maju dan berdaya sebagai ciri dari ma­sya­rakat modern adalah disebabkan karena faktor per­ubahan sosial. Perubahan sosial tandas Samuel Koenig sebagaimana disitir Soekanto menunjukkan pada modifikasi-modifikasi yang terjadi karena faktor-faktor eksternal dan internal, (Soerjono Soekanto: 1999: 337). Faktor internal bisa terjadi mungkin ka­re­na terjadi ketegangan (*tension*) antara sesama pengelola pesan­tren untuk mempertahankan ciri khas pesantren atau ber­adap­tasi dengan tuntutan masyarakat, (Bronislaw Malinowski: 1961: 15).

Kemudian faktor eksternal itu bisa terlaksana lan­taran perubahan sosial budaya sebagai akses dari kontak budaya dan akulturasi antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan lain, sehingga menghasilkan bentuk kebudayaan baru. Namun semua konsep tentang per­ubahan itu sesungguhnya merujuk pada suatu proses per­alihan, dari suatu tahapan keadaan sosial ke tahap berikutnya, serta melibatkan faktor waktu. Dengan de­­mikian, perubahan sosial merupakan proses yang ber­ke­si­nam­­bungan dalam suatu kurun waktu tertentu yang ber­kaitan dengan pengadopsian teknologi.

Perubahan yang disebabkan penyesuaian diri dan terjadi secara penuh kesadaran disebut *sosial change, cultural change, sociocultural adaptation* atau *adjustment,* (Astrid S. Susanto-Sunarto: 1998: 35). Untuk itu, tantangan yang dihadapi pesan­tren harus dimaknai se­bagai peluangnya dalam merespon era modern. Pesan­tren dengan tradisi dan nilai-nilai yang dimiliki akan mampu menjadi solusi alternatif bagi problem pen­di­dikan di dunia modern. Hal ini menuntut adanya pe­ningkatan kua­li­tas dan perbaikan manajemennya. Se­hing­ga, peran besar lembaga keislaman harus bisa meng­­imbangi dan memberikan arah arus atau proses moder­ni­sasi yang cenderung hanya me­ne­kankan aspek la­hiriah, mengesampingkan aspek batiniah sehingga yang terjadi adalah runtuhnya nilai-nilai moral.

Bertolak dari konsep perubahan sosial itu, maka dapat di­kata­kan bahwa peran pesantren cukup signi­fikan dalam mem­pengaruhi terjadinya perubahan sosial, baik perubahan nilai dan ide serta sikap, penga­laman, persepsi dan bahkan refleksi dari perubahan yang terjadi dalam struktur masya­ra­kat, (Eva Efzioni Halevy: 1997: 55). Sebab, antara agama dan ma­syarakat ter­dapat hubungan integral. Joachim Wach ber­pen­dapat bahwa hubungan agama dan masyarakat itu setidaknya memiliki tiga aspek. *Pertama,* aspek teoritis yang berupa sistem ke­percayaan. *Kedua*, adanya sistem kaidah yang mengikat pe­nga­nutnya se­bagai aspek praktis. *Ketiga*, aspek sosiologis, yakni nilai-nilai keagamaan yang secara alamiah membentuk dan mem­per­tahankan hubungan sosial, (Joachim Wach: 1971: 19-27).

Secara sosiologis, nilai-nilai agama akan mem­pe­nga­ruhi integritas masyarakat secara positif dan melekat dengan mem­ba­wa pengaruh destruktif. Kohesi yang kuat dalam ke­lom­pok masyarakat dipengaruhi oleh agama. Karena leng­kap­nya ko­hesi itu, maka fungsi sosial dan agama secara ke­se­luruhan nampak sebagai ikatan yang sempurna. Semua fungsi sosial yang dilakukan ‘mungkin’ dianggap sebagai ungkapan loya­li­tas terhadap nilai-nilai yang lebih tinggi yang mengambil mak­na semi-religius. Maka untuk memperkuat ikatan-ikatan sosial yang ada, hal itu dapat dilakukan dengan meng­ajak berbuat peribadatan secara lebih mendalam.

Adapun perubahan budaya (*culture*) merupakan proses perubahan tatanan sosial atau masyarakat dari bentuk lama ke bentuk lain. Perubahan ini mencakup struktur kehidupan ma­sya­rakat, organisasi tradisional atau lokal, bentuk pemukiman, sistem kepercayaan, pen­didikan dan pola konsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, perubahan dalam dimensi kultural mengacu pada per­ubahan kebudayaan dalam masyarakat, seperti ada­nya penemuan (*discovery*) dalam berpikir, pembaharuan hasil (*invention*) teknologi, kontak dengan kebudayaan lain yang me­nyebabkan terjadinya difusi dan peminjaman ke­budayaan. Di­men­si perubahan budaya meliputi: inovasi, difusi, dan in­tegrasi, (M. Munandar Soelaiman: 1998: 55). Sedangkan, per­ubahan pada dimensi interak­sional berkaitan dengan per­ubahan relasi sosial yang menyangkut kuantitas (frekuensi) dan jarak sosial adalah: *intimitas*, peralatan yang digunakan, ke­teraturan dan sebagainya.

Maraknya perubahan sosial itu menyebabkan pem­bica­ra­an tentang pesantren menjadi penting untuk di­kaji. Namun, dalam menghadapi derasnya perubahan sosial budaya itu, nam­paknya Pesantren Maslakul Huda Kajen Pati tidak hanya cukup dengan apa yang dimiliki dan dilakukan selama ini. Pesantren itu memperluas peran-peran tradisionalnya dengan berbagai terobosan lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Dengan demikian, upaya inovasi pesantren sebagai in­stitusi sosial perlu digalakkan sebagai konsekuensi me­res­pon tuntutan masyarakat. Dalam memenuhi tun­tutan ini, problem pemberdayaan masyarakat terletak pada organisasi dan sistem pendidikan dan pengajaran. Jika pesantren mengalami sebuah perubahan orientasi, maka keputusan merubah itu ditentukan oleh pemimpin pesantren. Namun, standar tujuan dan sistem pen­di­dikan itu harus sesuai konsep luar (kebutuhan) luar, (M. Dawam Rahardjo: 1985: 246). Sehingga kemapanan suatu insti­tusi itu ditentukan oleh adanya konsensus bersama terhadap tujuan yang sama pula, (James MacGregor Burns: 1978; 290).

Tujuan pendidikan pesantren yang dikembangkan dalam kurikulum sebenarnya diarahkan untuk me­wu­jud­kan ter­ben­tuk­nya manusia yang memiliki kesadaran yang setinggi-ting­gi­nya akan bimbingan agama Islam yang bersifat m­e­nye­luruh, dan dilengkapi kemampuan untuk mengadakan respons ter­hadap tantangan dan tuntutan hidup dalam konteks ruang dan waktu yang ada, (Nurcholish Madjid: 15). Dengan meru­mus­kan tujuan pendidikan harus dipertimbangkan formulasi ke­nya­taan yang terjadi di masyarakat. Ketika masyarakat berubah sesuai tuntutan proses perubahan zaman, maka tujuan pen­di­dikan pesantren juga musti mengantarkan masyarakat sesuai harapan. Dengan demikian, pem­baharuan pendidikan yang dilakukan pesantren selalu didasarkan kaidah:

“Melestarikan nilai-nilai lama yang baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik”.

Kaidah ini telah menjadi acuan yang cukup kuat dalam kul­tur pesantren dan sekaligus sebagai pegangan bagi upaya pembaharuan yang dilakukan oleh masya­ra­kat santri yang ter­sebar di Indonesia. Semangat itu ditopang oleh Al-Qur’an sebagai berikut:

“Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka menga­lir­lah ia (air) dilembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa (logam) yang me­reka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti (buih) arus itu”.... **(QS. Ar-Ra’d: 17)**

Atas dasar itulah sistem pendidikan pesantren pada masa depan diharapkan menjadi model pendidikan al­ternatif. Pola ini merupakan bagian dari kebutuhan untuk menemukan kem­bali makna pendidikan formal dan nilai prakteknya bagi semua kelompok sosial, bukan hanya untuk sejumlah kecil orang ter­tentu. Pendidikan alternatif untuk merespon tan­tangan zaman di masa depan diharapkan mampu me­la­hirkan manusia ber­iman dan bertakwa sekaligus mengua­sai iptek secara profe­sional. Pemenuhan kebu­tuh­an sumber daya manusia semacam itu sangat me­macu laju perkembangan pem­bangunan pada umumnya. Maka, pendidikan sebagai *agent of change* yang mem­bawa perubahan sosial itu me­nun­tut adanya perubahan dan pembaharuan kurikulum, (Wahjoetomo: 1991: 126).

Selanjutnya, pembaharuan sistem belajar dan kuri­kulum pendidikan pesantren diharapkan dapat berperan aktif dalam mendorong terwujudnya perubahan sosial yang berfungsi untuk memformulasikan pesantren dari pranata Islam yang se­mata-mata hanya memproduksi ulama yang bersifat kera­hiban dan tertutup menjadi pusat pengembangan masya­ra­kat akibat perubahan sosial. Perubahan sosial itu menurut Soerjono Soekanto diduga akibat perubahan sosial budaya dan cara ber­pikir didorong oleh faktor internal, yakni kemauan seluruh elemen untuk berubah. Keinginan untuk berubah atau mem­per­barui cara pandang dan berpikir dalam me­nyikapi per­ubahan sosial budaya sebagai akibat dari laju modernitas ini sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada masyarakat yang ber­henti (*stagnant*) pada satu titik ter­tentu sepanjang masa, (Soerjono Soekanto: 1999: 333).

Pendapat ini menyebabkan terjadinya pergeseran pene­kanan dalam materi kitab-kitab tradisional yang tampaknya akibat pengaruh modernisme, (Martin van Bruinessen: 1999: 18). Realitas ini terjadi hampir di semua pesantren yang mengalami perubahan menuju ke­bang­kitan kembali ilmu pe­ngetahuan dan teknologi (iptek) di dunia Islam. Namun hal ini dipersyaratkan adanya kemauan pesantren untuk mem­buka diri ter­hadap iptek dengan memasukkan unsur-un­sur­nya ke dalam kurikulum dan kegiatannya tanpa menggeser materi keagamaan, sekaligus untuk mengantisipasi per­ubahan pada masa kini dan yang akan datang.[]

- 2 -

REORIENTASI KURIKULUM PESANTREN

**BEBERAPA** saat yang lalu, semua elemen masya­ra­kat di­gegerkan dengan penetapan berlakunya kurikulum baru yang diberi nama kurikulum 2013. Satuan pendidikan baik sekolah dan madrasah sudah ancang-ancang melaksanakan perubahan kurikulum ini, mengingat sebelumnya masih meng­gu­nakan kuri­kulum KTSP tahun 2006. Perubahan kurikulum itu sepatut­nya juga ter­ja­di pada pendidikan pesantren. Sebab, ia menjadi ba­gian dari lem­baga pendidikan yang juga dituntut *proaktif* menyikapi perubahan kurikulum itu sedini mungkin, termasuk dengan melakukan kajian kurikulum yang sejalan dengan sis­tem pendidikan di Indonesia.

Jika ditelaah secara seksama, posisi kurikulum dalam dunia pendidikan terbilang sangat penting. Ia menem­pati po­sisi yang strategis. Tanpa adanya kurikulum, arah pendidikan tentu menjadi tidak jelas dan kabur.

Maka dari itu, memahami suatu kurikulum sangat ter­gan­tung dari situasi dan kondisi di satu wilayah. Ada suatu wi­la­yah yang memahami kurikulum sebagai se­suatu yang bersifat kaku dan tradisional. Dalam hal ini, kurikulum dimak­nai se­bagai daftar (materi) pelajaran yang harus diselesaikan dalam tiap pertemuan di kelas.

Ada sebagian kelompok lain yang memahami kuri­kulum sebagai *manifesto* yang bersifat luwes. Sehingga, kurikulum se­ring­kali ditafsirkan dengan cara-cara yang lebih luas dan me­nye­­luruh. Semua yang berhubungan dengan proses belajar meng­ajar dianggap sebagai satu kesatuan kurikulum yang sifat­­nya dapat berubah se­waktu-waktu dan fleksibel. Dengan demikian, kuri­kulum nampaknya menempati posisi yang di­bu­tuhkan dan sesekali menimbulkan perbedaan pendapat di ma­syarakat.

Sementara itu, antara pendidikan dan masyarakat meru­pa­kan bagian sentral yang tidak dapat dipisahkan. Di antara keduanya terjalin suatu hubungan yang saling membutuhkan, saling memberi kontribusi. Sehingga, ke­tika pemerintah men­co­ba membuat ‘kurikulum baru’ hendaknya kurikulum itu di­sesuaikan dengan ke­bu­tuh­an masyarakat. Dan perubahan itu pula hendaknya memperhatikan dasar-dasar kejiwaan anak, kondisi so­sial kemasyarakatan, keterampilan (skill), dan ke­bu­tuhan masa depan.

Sebab, secara sosiologi tiap perubahan yang terjadi pada kelompok masyarakat mengandung implikasi yang besar bagi pola kehidupan mereka dan akan ber­pe­ngaruh juga pada se­kolah. Dan hal ini secara tidak lang­sung mengundang pe­no­lakan dari publik dengan ber­bagai alasan. Bagi mereka, ketika kurikulum menya­la­hi aturan masyarakat, ia harus dirubah ke­mu­dian direvisi lagi hingga sejalan dengan kondisi masya­ra­kat yang terus menerus mengalami perubahan.

Idealnya, perumusan kurikulum mampu men­jang­kau se­cara menyeluruh sekaligus difahami sebagai satu kesatuan. Sehingga, dari kurikulum inilah suatu ide besar, gagasan baru bisa muncul sekaligus menjadi repre­sen­tasi dari lembaga pen­didikan yang mendidiknya. Maka, ada kalanya kurikulum disusun oleh pemerintah pusat.Ada juga lembagapendidikan yang membuat kurikulum secara mandiri. Sedangkan isi ku­ri­kulum dipetakan menjadi beberapa hal, yang meli­puti proses belajar mengajar, ketrampilan, tingkah laku, dan tingkat ke­hidupan individu anak.

Dengan demikian, ada titik lemah tersendiri dalam suatu kurikulum ketika ia dihadapkan pada penyusunan kurikulum. Ia harus relevan dengan kebutuhan masya­ra­kat. Hal itu dituju­kan agar titik kulminasi penolakan ma­­syarakat memuncak, ketika ia tidak segera direvisi.

Reorientasi Kurikulum

Upaya untuk memodifikasi kurikulum dalam rangka pe­nyem­purnaan pendidikan di pesantren bukan hal yang mu­dah. Betapa tidak, ada dua variabel ketika kita mencoba meng­eva­lua­si suatu kurikulum itu. Dan kurikulum itu juga tidak bisa diganti (direvisi) secara menyeluruh. Hal ini disebab­kan in­sti­tusi pendidikan/lembaga pendidikan pesantren telah mem­pu­nyai tujuan dan target tersendiri yang umumnya telah diten­tu­kan.

Namun demikian, ada dua cara ketika kita mau mengubah suatu kurikulum di pesantren, jika sekiranya kurikulum itu dinilai kurang relevan bagi dunia pesantren. *Pertama*, teori re­vo­lusioner. Teori ini me­la­kukan perubahan dengan cara pe­rom­bakan secara besar-besaran di lem­baga pendidikan pe­san­tren. *Kedua*, teori evolusioner. Ia melakukan perubahan kuri­kulum dengan jangka waktu yang cukup panjang dengan cara evolutif, berjalan sesuai proses waktu atau masa.

Adanya perubahan kurikulum ini diharapkan mem­bawa angin segar bagi kemajuan pendidikan pesantren itu sendiri. Se­tidak­nya ketika hendak mengorientasikan kembali kuri­ku­lum, maka akan menemukan kurikulum pada suatu perubahan yang diharapkan dapat membawa ino­vasi baru pada pen­di­dikan masa depan, mempunyai i’tikad baik tanpa adanya iso­lasi, dan bersifat menye­lu­ruh, sifat dasar dari perubahan yang direncanakan akan mengarah pada seluruh proses pendidikan.

Sehingga dari sanalah, perubahan suatu kurikulum akan berdampak baik pada pola pikir dan sikap pim­pin­an pesantren, para pengasuh, santri dan masyarakat pesantren lainnya,dan ten­­tunya harus barengi dengan keberhasilan proses belajar meng­ajar di pesantren itu sendiri.**[]**

- 3 -

PESANTREN DAN TERORISME

**AKHIR**-akhir ini, ada sebuah wacana yang cukup serius terkait keterlibatan lulusan pesantren dengan tindak terorisme di Indonesia. Ada anggapan bahwa pon­dok pesantren menjadi sarang teroris. Pondok pe­santren dinilai sarat akan tindak ke­kerasan. Apalagi para lulusan pesantren, seperti Amrozi, Imam Samudra, dkk. menguatkan pernyataan itu dengan men­jalan­kan tindak terorisme. Padahal dulu, pesantren adalah rumah ramah yang mampu menampung semua orang dari berbagai latar belakang untuk belajar agama Islam dengan penuh rasa ke-*khusu’-*an dan ke-*tawadu’-*an kepada kyai.

Dengan kejadian itu, kini pesantren mendapati dam­pak negatif atau implikasi yang luar biasa. Tak pelak, maka akan su­kar ditepis anggapan bahwa pe­san­tren telah menelorkan santri-santri yang mempunyai ‘bakat’ teroris. Tindak terorisme yang dilakukan lulusan pesantren ini tentu secara lahir meng­iyakan stigma itu, bahwa antara pondok pesantren dan tero­ris­me mem­pu­nyai hubungan yang saling-berkaitan. Maka per­tanyaan yang timbul, bernarkah pesantren seperti itu?

Budaya Indonesia

Menghubungkan pesantren dengan terorisme sejati­nya me­rupakan perbuatan yang *a historis* (tidak ada dalam sejarah). Nurcholish Madjid, seorang cende­kiawan Islam Indonesia abad-20 ini berani menegaskan bahwa pesantren adalah sebuah institusi pendidikan Islam tertua yang mengandung watak ke­aslian Indo­ne­sia. Artinya, model pendidikan pesantren tum­buh dan berakar pinak dari sebuah tradisi, kultur (budaya) dan watak bangsa Indonesia yang ramah dan santun.

Bahkan jauh sebelum Islam datang, konon model pen­di­dikan serupa pesantren pun sudah ada. Ini artinya, pesantren sudah berakar kuat dalam tradisi kebudayaan Indonesia. Hal ini juga setidaknya dapat dijadikan anti tesis dari pelbagai pemikiran golongan radikal yang menyatakan bahwa pesan­tren identik dengan teroris.

Meski demikian, nampak bahwa citra ‘pesantren yang ramah’ berubah menjadi ‘pesantren yang marah’. Hal ini terjadi lantaran aksi terorisme yang dilakukan oleh segelintir lulusan pesantren –oleh Amrozi, dkk–, didukung keterlibatan KH. Abu Bakar Basyir yang diduga sebagai otak di balik layar pelbagai tindak aksi terorisme di Indonesia. Sebagai seorang pengasuh pe­san­tren, KH. Abu Bakar bisa dikatakan membuat pesantren yang lain turut ‘terjepit’. Pesantren pun selalu dipojok­kan ke­ti­ka ditemukan berbagai tindak terorisme. Pesan­tren pun tidak bisa menghindar menjadi sorotan dunia.

Sesungguhnya kalau kita benar-benar memahami sejarah dan hakikat pesantren, maka klaim-klaim negatif terhadap pe­santren tidak akan mendapat tempat dalam relung pemi­kiran masyarakat. Perlu ditegaskan bahwa tuduhan miring terhadap pesantren sebagai sarang tero­ris, sungguh merupakan sesuatu yang tidak sesuai dengan landasan yang logis serta tidak mem­pu­nyai akar sejarah yang kuat.

Untuk itu, ada beberapa argumentasi untuk me­nyangkal anggapan buruk itu dengan pembacaan dari berbagai per­spek­stif. *Pertama*, dalam perspektif sejarah, pesantren merupakan sebuah benteng pertahanan ke­islaman ortodoks atau tradisio­na­lisme. Oleh karenanya, pesantren selalu diidentikkan dengan ormas Nahdlatul Ulama (NU). Meski dalam fase berikutnya, pondok pesantren tidak hanya dimiliki oleh NU atau sebagai identitas dari NU. Pesantren kini menjadi sarana umum yang tidak hanya dimiliki oleh NU. Hanya saja, dalam dunia pe­santren—terutama di Jawa—banyak yang di­pengaruhi oleh budaya NU yang diyakini sangat mo­derat sesuai ajaran yang diyakini.

Dalam konteks demikian, menuduh pesantren se­bagai sarang teroris sama artinya dengan mengatakan NU adalah sarang teroris. Padahal, beberapa penelitian mutakhir tentang politik Islam di Indonesia, seperti penelitian yang dilakukan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat [PPIM] UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menunjukkan bahwa Islam moderat merupakan *mainstream* keberagamaan Muslim Indonesia, dan Islam radikal merupakan sebuah Muslim minoritas belaka. Hal itu diperkuat lagi dari sikap-sikap moderat yang di­peragakan oleh dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah.

*Kedua*, ditinjau dari kurikulum atau materi yang diajarkan di pesantren. Dalam hal itu, pesantren tidak pernah sekalipun mengajarkan tentang paham atau ajaran radi­kalis­me, apalagi melakukan tindakan teroris­me. Dalam catatan sejarah, pesan­tren hanya berfungsi sebagai tempat pengajian Al-Qur’an, tasa­wuf, dan dasar-dasar keislaman, seperti tata cara shalat, dan sebagainya. Setelah itu, pesantren mulai mengajarkan pel­bagai kitab kuning.

Pada masa selanjutnya, pesantren tidak hanya meng­­ajarkan kitab-kitab kuning yang berbahasa Arab saja, melain­kan juga buku-buku dari berbagai bahasa terutama buku yang ber­bahasa Inggris. Masuknya buku-buku bahasa Inggris atau se­jenisnya pada akhirnya jus­tru melahirkan paham-paham ke­islaman yang bebas, atau liberal. Golongan Islam yang di­kategorikan liberal dari lulusan pesantren dalam golongan ini sangat banyak, seperti Ulil Abshar-Abdalla, Masdar Farid Mas’udi, dan lain sebagainya.

*Ketiga*, dilihat perspektif profil seorang alumni pondok pe­santren. Dari perspektif ini bisa juga cukup memberi war­na untuk bisa mematahkan tuduhan miring pe­san­tren sebagai sarang teroris. Harus diakui bahwa alumni pesantren banyak tersebar ke dalam berbagai sektor. Ada yang menjadi tokoh masyarakat dan kyai pondok pesantren. menjadi aktivis di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), menjadi akademisi, bah­kan ada juga yang menjadi politisi dan negarawan, semisal Gus Dur, Mahfudz MD, Dahlan Iskan, dll. Dan masih banyak lagi alumni pesantren yang menjabat di berbagai sektor yang lain.

Kebanyakan dari mereka adalah tokoh yang aktif meng­kam­panyekan Islam moderat. Dari sini, dapat di­ambil kesim­pulan bahwa tidak ada alasan yang konkret bagi siapapun ketika mengatakan pesantren sebagai agen terorisme. Namun, per­soalan sekarang ini harus dijelas­kan secara rinci, mengapa dari alumni pesantren ada yang melakukan aksi terorisme?

Dari pertanyaan ini, ada jawaban yang sangat kompleks. Ada banyak variabel yang melatarbelakangi aksi-aksi para alum­nus pesantren tersebut. Bisa jadi, kurikulum peng­ajaran­nya ada yang salah, bisa jadi juga karena ada faktor lain. Dengan demikian, mengklaim pesantren sebagai sarang teroris jelas merupakan sebuah penilaian yang tergesa-gesa dan *over­simplifikasi*. Perlu diadakan kembali penelitian tentang hal untuk bisa meng­klarifikasi persoalan yang muncul kemudian.**[]**

Bagian Kelima

MEMBANGUN ETOS KERJA

- 1 -

PERSONALITY DALAM *PUBLIK RELATION*(UPAYA MEMBANGUN JARINGAN KERJA)

**MEMILIKI** keahlian sebagai seorang presenter atau *Master of Ceremoni*(MC) merupakan suatu keuntungan tersendiri di era modern saat ini. Selain dapat diman­faat­­kan sebagai profesi yang menjanjikan, ia juga mam­pu mendatangkan rezeki bagi penggunanya. Tak tang­gung-tanggung, ia juga digadang-gadang mampu mem­peroleh upah melebihi gaji seorang Pegawai Negeri Sipil, menghantarkan sese­orang memperoleh ‘ketenaran’ bahwa melebihi ‘tenar’nya Menteri ataupun ang­gota DPR. Sehingga, tidak mustahil jika profesi ini diminati banyak orang. Meski pada akhirnya sebagian dari mere­ka men­jalani masa-masa yang sulit hingga tidak sedikit yang meng­alami kegagalan.

Demi meraih kesuksesan menjadi seorang presenter di­per­lukan pelbagai prasyarat serta kompetensi yang me­madai. Diantara pra syarat itu yang perlu kita penuhi adalah ke­mam­puan untuk memiliki kepribadian, tampilan yang me­narik; memiliki strategi untuk mendapatkan simpati; mampu me­ngem­bangkan jaringan kerja yang baik; serta mempunyai modal kompetensi atau keahlian lain yang mendukung.

Tampil Simpatik

Seorang dapat dikatakan sebagai presenter yang baik, jika ia mampu memperagakan penampilan yang simpatik, energik, dan mampu meyakinkan di depan kha­layak umum. Ketika ia tidak mampu, maka sub­stansi atau isi materi yang disajikan tidak akan mampu menghipnotis publik. Belum lagi, program yang di­ca­nang­kan tidak mendapat dukungan dari *mustami’in,* sehingga berujung dengan kehampaan.

Untuk bisa tampil secara meyakinkan di depan pu­blik, di­butuhkan penguasaan materi sesuai jenis acara yang akan di­sajikan. Dengan hal ini, seseorang justru akan tertambah rasa kepercayaan dirinya. Selain itu, kita juga dituntut untuk bisa menampilkan penampilan yang wajar, bersahaja; menjiwai ter­hadap materi-materi yang akan dihantarkan; lihai dalam me­mainkan dan memilah pola bahasa yang cocok dengan bahasa pendengarnya.

Perlu dipahami bahwa menjadi seorang presenter yang baik dan tampil simpatik tidak bisa muncul secara tiba-tiba. Menjadi presenter yang baik dibutuhkan la­tihan secara rutin, terus menerus, sesekali tampil dalam uji coba di depan publik, baik dilakukan secara seder­hana maupun secara kompleks. Baik uji coba di tingat RT maupun sampai tingkat nasional.

Jaringan Kerja

Selain itu, jaringan kerja merupakan modal kom­ponen yang penting menuju kesuksesan dalam berbagai bidang, ter­masuk menjadi presenter. Membangun jaringan kerja perlu mempertimbangkan beberapa hal. *Pertama*, mengenali ling­kungan. Lingkungan menjadi kunci bagi terbentuknya karakter seseorang. Jika salah bergaul, tidak peka terhadap gaya hidup di ling­kungan­nya, maka seseorang akan kesulitan untuk ber­dialog dengan apa yang ada dalam lingkungan itu, ter­ma­suk dengan manusia, budaya dan seisinya.

*Kedua*, memperkenalkan diri secara wajar. Usai me­nge­nali lingkungan, seseorang juga tidak boleh memak­sakan diri untuk dikenal di suatu masyarakat. Kita seyogyanya bisa mem­per­kenal­kan diri secara baik-baik, sesuai kearifan lokal yang ada dalam masyarakat. Karena dalam masyarakat, kekerasan tidak akan menyelesaikan suatu masalah.*Ketiga*, melakukan pen­de­katan dengan baik. Seseorang dapat melakukan pendekatan dengan siapapun dalam masyarakat, asalkan tidak me­non­jol­kan keunggulan diri sendiri secara berlebihan. Ada baiknya, pendekatan yang dilakukan lebih mengutamakan pujian ke­pada pihak lain. Dengan demikian, seseorang akan diterima dengan mudah oleh masyarakat.

*Keempat*, menunjukkan bukti. Bukti juga menjadi pen­ting sebagai instrumen penunjang kepercayaan ma­sya­rakat. Bukti yang kita sampaikan ada baiknya tidak melalui banyak kata. Sebab, pada umumnya masyarakat lebih percaya pada bukti, bukan sebatas kata-kata, janji. *Kelima*, berupaya tidak menge­ce­wa­kan penggemar. Ma­sya­rakat adalah objek sasaran dari jaringan kerja. Ma­sya­rakat harus dimanjakan dengan apa yang kita sampaikan. Jika pada pemulaan sudah tidak menuai ke­co­cokan, se­lan­jutnya kita juga akan kesulitan dalam bergumul dengan masyarakat lain.**[]**

- 2 -

PERS DAN MORALITAS BANGSA

**ERA** modern adalah masa dimana perkembangan tek­no­logi didominasi oleh informasi dan teknologi. Dunia digital (maya) menjadi indikator bahwa dunia dapat berubah se­waktu-waktu. Dewasa ini, ketika sese­orang tidak mengenal teknologi atau gagap terhadap teknologi (gaptek), ia tidak akan tahu perkembangan dunia. Sebaliknya, jika seseorang mampu menguasai tek­nologi dan informasi, secara langsung ia menjadi ma­nu­sia yang unggul sekaligus menguasai dunia.

Bagi kita, perkembangan teknologi yang paling mu­dah dicerna yakni adanya awak media, pers. Insan me­dia, pers me­rupakan salah satu instrumen untuk menge­tahui perkem­bang­an dunia ini. Media itu bisa berupa koran, majalah, TV, Radio, On line, dan lain sebagainya.

Melalui media, kita bisa saling komunikasi, saling bertukar informasi yang tentunya sangat diperlukan dalam dunia tek­nologi dan informasi. Ada yang menga­ta­kan bahwa orang-orang yang bergelut dalam dunia media dianggap sebagai orang yang unggul dan hebat. Jika kita ingin pintar, unggul, hebat, maka salah satu cara­nya yakni harus cinta dengan pers dan suka ber­gumul dengan awak media.

Pers sebagai Alat Kontrol

Adanya pers sangat berpengaruh dalam relung ke­hi­dup­an manusia. Kekuatan pers bahkan mampu mem­pe­ngaruhi selera dan pola hidup masyarakat. Maka tidak heran, jika pers dengan berbagai idiomnya terus mena­war­kan kepada ma­sya­rakat untuk terus meman­faatkan media sebagai sarana untuk menambah wawasan infor­masi.

Pers juga di gadang-gadang mampu mengubah wa­jah dunia serta pola keberagaman masyarakat dalam ku­run waktu yang singkat. Dengan kekuatannya, ia juga kadangkala mampu ‘menghipnotis’ pihak pemangku ke­bi­jakan untuk meratifikasi kebijakan-kebijakan pe­merintah yang merugikan rakyat.

Dalam dunia pendidikan, pers juga dituntut untuk menga­wal asa masyarakat yang menuntut untuk mem­ber­lakukan dana pendidikan sebesar 20% dari APBN. Hal itu bisa di­laku­kan dengan menyajikan berita-berita yang berkait dengan pen­didikan di koran, televisi atau di media maya. Memang, sekarang ini sebagian dana dari APBN sudah dialokasikan untuk pendidikan. Maka, tugas pers adalah sebagai alat untuk mengkontrol ke­bijakan itu. Yang kemudian, alokasi dana dari APBN sebesar 20% bisa diserap semua kalangan, tanpa adanya penyimpangan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Selain itu, media juga yang rajin mewartakan di ko­ran atau di televisi berperan sentral dalam mengawal ke­stabilan politik dalam negeri. Dalam artian, media mampu menyejajarkan perihal yang baik dan yang tidak, asalkan dengan kabar yang proporsional. Termasuk ketika media berusaha memotret ke­sen­jangan antara sekolah dan madrasah yang kemudian mun­cul UU. No. 20 tahun 2003 dan PP No. 55 Tahun 2007.

Belum lagi dalam tataran ekonomi, pers juga sangat mem­bantu perekonomian masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari pemberitaan tentang kenaikan harga BBM beberapa tahun lalu yang mengakibatkan lonjakan harga bagi sembako yang me­langit. Turunnya pak Harto (presiden RI ke-2) juga tidak le­pas dari bantuan insan media yang secara *continue* mengawal ke­ber­adaan maha­siswa yang melakukan aksi demonstrasi me­nen­tang ke­bijakan orde baru yang dinilai menyengsarakan publik.

Sebagai alat pengontrol, bahkan pers (media) di­sebut se­ba­gai pilar demokrasi keempat, selain eksekutif, legislatif, yudikatif dan mahasiswa. Dengan demikian, keberadaan pers sangat penting dan efektif dalam rangka me-*monitoring* ke­bijakan pemerintah dalam menye­jah­tera­kan masyarakat.

Pers dan Moralitas

Meski demikian, pers mempunyai sifat dualisme. Satu sisi, ia berfungsi bagi alat kontrol sekaligus alat penyampai warta kepada masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat merasa di­untung­kan dengan fungsi pers. Di lain sisi, ia juga sarat akan penyalahgunaan wewenang, terutama terkait proporsi berita yang dimuat. Seringkali ditemukan tentang berita pesanan dari pihak lain; kadangkala juga sebuah berita dijadikan ajang pe­me­rasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Adanya sikap dualisme ini perlu disikapi dengan cermat, agar kita tidak terjebak hanya dalam kekuatan media. Kalau diandaikan, pers di negeri ini ibarat sebuah pisau tajam yang bermanfaat bagi ibu-ibu rumah tangga, dan bermanfaat bagi para penjahat. Agar pers berjalan dengan baik, agaknya pers ‘perlu’ dibekali nilai moralitas yang diterapkan terhadap kru dan wartawannya, agar nantinya bisa menyampaikan berita secara proporsional kepada publik.

Dalam taraf tertentu, kesaktian media juga dapat men­jadikan seseorang lupa daratan. Ketika seseorang terbiasa me­nonton TV, mendengarkan radio, *ngenet,* atau­pun dengan lain­nya menggunakan perabotan media, secara tidak langsung akan berdampak pada psikis anak yang mendorongnya men­jadi pribadi nakal. Begitu juga sebaliknya, berita yang ada di koran akan mendorong para siswa rajin belajar, membaca pengetahuan yang ada di sebuah media.

Disadari atau tidak, kehidupan saat ini sangat ber­gan­tung pada pola pemanfaatan terhadap media. Kema­juan ataupun kemunduran kehidupan ini jika kita tidak mengetahui apa yang ada dalam isi media itu. Adanya pers juga sangat ber­dampak pada moralitas kehidupan berbangsa. Semakin ‘sehat’ pers di Indonesia, maka makin bermartabat pula ke­beradaan bangsa ini. Singkat kata, pers yang sehat dapat menjaga mo­ralitas bangsa.**[]**

DAFTAR PUSTAKA

Astrid S., Susanto, Sunarto, *Masyarakat Indonesia Mema­suki Abad XXI*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998.

Agus, Salim, *Perubahan Sosial, Sketsa dan Refleksi Metodologi: Kasus Indonesia,* Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.

Malinowski*,* Bronislaw, *The Dynamic of Culture Change*, New Haven: Yale University Press, 1961.

Eva Efzioni Halevy, *Social Change: The Advent and Maturation of Modern Society*, London: Routledge & Kegan Paul, 1997.

Jabali, Fuad, *IAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.

James MacGregorBurns, *Leadership,*  New York: Row Publishers, 1978.

Joachim, Wach, *Sociology of Religion*, Chicago: University of Chicago Press, 1971.

M. Dawam Rahadjo, “Pembangunan Masyarakat dalam Perspektif Pesantren” (ed.), *Pergulatan Dunia Pe­san­tren: Membangun dari Bawah*, Jakarta: Per­him­punan Pengembangan Masyarakat Pesantren – P3M, 1985.

M. Munandar, Soelaiman*, Dinamika Masyarakat Transisi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Martin vanBruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia,* Bandung: Mizan, 1999.

Nurcholis, Madjid, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina, 1997.

Soerjono,Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1999.

Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren: Pendidikan Alternatif Masa Depan,* cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Ziemek, Manfred,  *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, terj. Butche B. Soendjojo, Jakarta: Perhimpunan Pe­ngembangan Pesantren dan Masyarakat - P3M, 1996.

TENTANG PENULIS

Dr**. H. A. Umar, MA.**lahir di Grobogan, 9 Januari 1964. Menye­le­saikan pendidikan di MI Miftahul Islam di Desa kelahirannya, kemu­dian melanjutkan pen­di­dik­an di MTs dan MA NU Demak. Pria yang meng­habis­kan waktu belajar di madrasah ini lulus S1 Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang (1990), Program Pascasarjana (S2) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1993),dan Program Doktor (S3) diselesaikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009). Secara berturut-turut penulis meniti karir sebagai dosen pada IAIN Walisongo Semarang (1994-2005), kemudian menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan (2005-2008), Kota Salatiga (2008-2010), dan Kabupaten Pekalongan (mulai 2010- sekarang).

Kepedulian penulis terhadap dunia pendidikan dibutikan dengan pengalamannya mengajar di beberapa sekolah, seperti SMP Hasanuddin 6 Semarang, MTs Sabilurrahman, dan MA YAUMI Gubug di Grobogan. Disamping itu penulis juga meng­ajar dibeberapa Perguruan Tinggi, seperti IAIN Wali­songo, Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang, dan Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Wonosobo (sekarang UNSIQ), serta mengikuti *Short Course on Education Manajemen* di Edit Cowan University (ECU), Pert, Western Australia pada 2004).

Suami Ir. Tri Hartini dan ayah dari dua putri (Isyna Izzal Muna & Marwa Nailul Muna) ini juga sempat menjadi Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Wonosobo dan Ketua Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo, saat ini tercatat sebagai pengajar pada Program Pascasarjana (S-2) Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang. Di luar itu, pria humoris ini pernah dan atau masih aktif pada beberapa organisasi seperti PMII, IPNU, LP Maarif NU Jawa Tengah, MUI Jawa Tengah, GP Ansor Jawa Tengah, PCNU Grobogan, dan LDNU Kota Semarang. Pe­mi­kiran-pemikiran khusus­nya mengenai pen­didikan dan ke­agama­an dipublikasikan dalam ber­bagai bentuk atikel, kolom, paper, laporan penelitian dan buku.

Penulis sangat terbuka untuk melakukan diskusi dengan siapa saja, dan jika ingin menghubunginya, silahkan meng­hu­bungi­nya lewat email: ahmad.umar024@gmail.com atau di nomor HP. 085225263359.[]